



**LAPORAN
SITUASI UMUM HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2019
DI PAPUA**

OLEH

**ALIANSI DEMOKRASI UNTUK PAPUA
JAYAPURA
5 FEBRUARI 2020**





Aliansi Demokrasi untuk Papua (Alliance of Democracy for Papua)

YAYASAN KERJA SAMA UNTUK DEMOKRASI DAN KEADILAN

Alamat : Jl. Raya Sentani Padang Bulan Abepura Jayapura-Papua 99351 Tlp (0967-5189728)

E-mail: aldp.papua@gmail.com, Website: <http://www.aldp-papua.com>

LAPORAN TAHUNAN 2019

(Ini BUKAN istilah Jika rakyat sedang lemah berarti negara terlalu kuat sebaliknya jika negara menjadi lemah berarti rakyat sangat kuat TETAPI Jika rakyat lemah artinya negara gagal sebaliknya jika rakyat kuat artinya negara berhasil melindungi rakyatnya)

I. PENDAHULUAN

Aksi kekerasan meningkat dalam berbagai dimensi dan terjadi di banyak tempat di Papua terutama di wilayah pegunungan. Mulai dari kontak tembak yang tidak mereda sejak akhir tahun 2018, kemudian aksi rasis terhadap orang asli Papua yang menimbulkan respon anti rasis di seluruh kota di Papua dan berimplikasi terhadap meningkatnya tindakan anarkis serta korban dari berbagai kalangan masyarakat sipil dan aparat keamanan. Penambahan pasukan keamanan dan proses hukum yang dilakukan belum mampu menyentuh pelaku utama apalagi menciptakan rasa aman dan adil. Rekonsiliasi yang dilakukan tanpa membangun komunikasi dari basis khususnya korban telah menyimpan luka diantara para pihak. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah meningkat, kohesi diantara masyarakat sipil rapuh dan penuh curiga.

II. ISU-ISU UTAMA :

1. Jokowi dan Kebijakan Infrastruktur di Papua

- a. Sejak presiden Jokowi memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di Nduga tetap dilanjutkan, usai peristiwa Nduga desember 2018, maka mobilisasi aparat keamanan terus bertambah di Papua. Kebijakan ini menambah resistensi masyarakat setempat terhadap kehadiran aparat keamanan. Selain itu makin memperjelas sikap pemerintah dalam menangani masalah di Papua, meskipun pemerintah mengatakan masalah di Papua adalah masalah kesejahteraan dengan pendekatan kesejahteraan namun faktanya pendekatan keamanan lah yang sangat dominan.
- b. Selain pembangunan infrastruktur kehadiran dana desa pun belum mampu meningkatkan perekonomian apalagi menciptakan kemandirian terbukti IPM Papua tetap berada diposisi bawah. Permasalahan dana desa makin rumit mulai dari otoritas tunggal yang hanya ada pada kepala desa, adanya dugaan penggunaan dana desa untuk desa yang fiktif atau masih belum jelas secara administrasi pemerintahannya hingga dugaan dipakai untuk *support* kelompok perlawanan bersenjata. Hal ini makin memperjelas kegagalan manajemen pemerintahan dalam menjalankan pendekatan kesejahteraan. Selain itu kebijakan pembangunan belum sepenuhnya memperhatikan eksistensi masyarakat adat, hak ulayat

tanah dan perairan, relokasi kampung dan dusun, ketersediaan dan kelestarian sumber-sumber kehidupan, AMDAL hingga masalah lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya seperti pada sejumlah investasi tambang, sawit termasuk pembangunan infrastruktur. Berbagai istilah seperti pembangunan yang bersifat holistic, memperhatikan 7 wilayah adat, pemihakan terhadap hak-hak masyarakat adat ataupun konteks sosial budaya serta lingkungan setempat hanya digunakan sebagai simbol atau alat justifikasi atas nama pembangunan.

- c. Dalam periode pertama kepemimpinan presiden Jokowi terbukti bahwa upaya penyelesaian masalah pelanggaran HAM khususnya kasus Wasior 2001 dan Wamena 2003 ataupun Paniai 2014 hanya jalan ditempat. Sangat politis. Presiden Jokowi juga gagal dalam upaya mempercepat dukungan terhadap pelaksanaan dialog meskipun sejak 2017 telah mengundang sejumlah tokoh untuk membahas mengenai dialog di Papua. Perjumpaan presiden Jokowi dengan sejumlah tokoh dari Papua usai aksi rasis, anti rasis dan anarkis tidak mengubah pendekatan pemerintah terhadap Papua ke arah yang lebih baik. Apalagi ketika perjumpaan itu hanya dihadiri oleh orang-orang yang sangat diseleksi sesuai dengan apa yang ingin didengar oleh pemerintah bukan apa yang seharusnya didengar oleh pemerintah. Pemerintahan di tingkat provinsi nyaris lumpuh. Kebijakan focus anggaran untuk pelaksanaan PON XX di Papua menyebabkan sejumlah program pembangunan tertunda. Jakarta mengambilalih kewenangan dan kontrol khususnya terhadap kebijakan hukum, keamanan dan ketertiban.

III. PERMASALAHAN DALAM DIMENSI SIPOL

1. Penangkapan terhadap masyarakat sipil disertai dengan dugaan tindakan diskriminasi, intimidasi dan penyiksaan. Proses hukum ditingkat kepolisian cenderung dilakukan dengan tidak profesional. Pemandahan tahanan yang seharusnya menjadi kewenangan dari pihak kejaksaan dan pengadilan sebagaimana terhadap 7 tahanan politik(Tapol), telah diambil alih oleh pihak kepolisian. Selain itu pemindahan tahanan dilakukan tanpa perencanaan yang tepat sebagaimana pemindahan tahanan kasus Deiyai dari Deiyai ke Polres Paniai untuk menjalani pemeriksaan kemudian dipindahkan ke Polres Nabire namun dipindahkan ke Polres Jayapura dan selanjutnya dibawa kembali ke Nabire untuk menjalani proses persidangan di PN Nabire. Juga pemindahan sejumlah tahanan dari Polres Jayawijaya ke Polda Papua untuk menjalani pemeriksaan kemudian di kembalikan ke Wamena Jayawijaya. Selanjutnya pemindahan terhadap MG, tersangka peristiwa Nduga desember 2018 dari Wamena ke Jakarta. Keseluruhan pola tersebut menggambarkan bahwa aparat penegak hukum dan keamanan setempat tidak mampu menangani permasalahan tersebut. Dampaknya proses hukum terkait orang Papua ada dimana-mana bahkan di daerah yang sebelumnya informasi mengenai Papua sangat terbatas. 'Menariknya' yang terjadi justru diskursus tentang Papua muncul dimana-mana. Adapun kasus-kasus yang disidangkan mulai dari penghasutan, pengrusakan, pembunuhan, melawan aparat, membawa sajam tanpa ijin hingga kasus makar. (**Lampiran : 1 Tabel Peristiwa Penangkapan tahun 2019**).

Terkait dengan aksi rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jogja dan sejumlah tempat lainnya diluar Papua telah menimbulkan *reaksi* dalam bentuk solidaritas aksi anti rasis hampir di seluruh tanah Papua. Awalnya reaksi yang dilakukan berupa aksi damai namun berubah menjadi anarki. Berbagai pihak telah menjadi korban jiwa serta mengalami kerugian material. Proses hukum yang dilakukan masih bersifat diskriminasi, selain itu tidak mampu mengungkapkan pelaku yang sesungguhnya. Dugaan mengenai keterlibatan pihak lain yang menyebabkan situasi menjadi tidak terkendali dan anarkis, juga tidak mampu diungkapkan oleh aparat penegak hukum. Penanganan pelaku terkait tindakan rasis yang dilakukan di Surabaya, Jogja dan tempat lain diluar pulau Jawa tidak seserius penanganan kasus aksi anti rasis di Papua. **(Lampiran 2 : Daftar Tersangka aksi anti rasis di Papua).**

2. Pendampingan 7 TAPOL Papua:

- a. Pemerintah menangkap tokoh KNPB yakni Buktar Tabuni, Agus Kosay dan Steven Itlay(ketua KNPB Timika), Simeon Itlay ditangkap terkait statusnya sebagai DPO bersamaan dengan kasusnya WNA Polandia yakni Jakob Fabian. Selain itu 4 mahasiswa yakni Alex Gobay (Ketua Senat USTJ), Ferry Kombo(ketua Senat Uncen), Hengki Hilapok (Mahasiswa USTJ) dan Irwanus Uropmabin(mahasiswa USTJ) atas tuduhan makar(Pasal 106 KUHP).
- b. Mereka dipindah paksa ke Polda Kaltim tanggal 4 Oktober 2019 dengan alasan keamanan. Sebelumnya, mereka, keluarga dan PH tidak diberitahu tujuan pemindahan bahkan mereka dipaksa menandatangani surat-surat tanpa diberi kesempatan untuk membaca atau dijelaskan terlebih dahulu. Selama perjalanan mereka duduk di lantai pesawat milik kepolisian dengan tangan dalam keadaan diborgol.¹ Menurut Polda Papua pemindahan tahanan sudah dikoordinasikan dengan pihak Forkompimda dan berbagai tokoh di Papua.² Pemindahan itu mengacu pada surat Ditreskrimum Polda Papua bernomor : B/816/X/RES.1.24/2019/Ditreskrimum tertanggal 4 Oktober 2019.
- c. Yang terjadi adalah dugaan tindakan sewenang-wenang negara atas nama hukum dengan menggunakan alasan keamanan sebab pada persidangan lainnya yang dilakukan di Jayapura dan beberapa kota lainnya di Papua berjalan aman. Pemindahan ini menunjukkan kegagalan berulang dari aparat keamanan untuk menjamin keamanan di wilayah Papua. Dalam aspek hukum tindakan ini juga tidak memenuhi prinsip peradilan yang cepat dan biaya murah karena proses yang berbelut-larut yang dimulai dari penanganan di tingkat penyidikan hingga pembiayaan yang sangat tinggi karena penyidik dan penuntut Umum semua berasal dari Papua. Selain itu mempersulit hak para tersangka atau terdakwa untuk bertemu dengan keluarga dan PH karena biaya yang sangat tinggi.
- d. Proses hukum terhadap mereka terkesan dipaksakan. Aparat penegak hukum menangkap mereka dalam kurun waktu yang berdekatan demi membangun *imej* bahwa mereka adalah otak atau pelaku dari aksi anti rasis yang berakhir anarkis. Namun pemeriksaan dan penuntutan terhadap mereka meluas bahkan terhadap sejumlah peristiwa yang sebelumnya

¹ Grup WhatsApp Koalisi Masyarakat Sipil Papua untuk Semua

² www.vivanews.com/amp/berita/nasional/11791-tujuh-tersangka-papua-akan-disidang-di-kaltim, diakses Pada Rabu, 23 Oktober 2019.

telah diketahui oleh aparat kepolisian, sangat *premature* juga *absurd* untuk dikatakan sebagai delik pidana. Di sisi lain, peran aparat keamanan, khususnya kepolisian dan pihak intelejen yang menjalankan fungsinya dalam mendekteksi, memantau, mengawal dan mengamankan jalannya aksi untuk mencegah dan menangani aksi agar tidak menjadi anarkis, luput dari perhatian atau kajian bersama.

3. Mahasiswa eksodus merupakan salah satu aktor yang berada pada dinamika konflik di Papua pada pertengahan tahun 2019. Mereka kembali ke Papua karena seruan yang dilakukan oleh MRP ketika merespon aksi rasis yang mereka alami saat berada di kota-kota studi di luar Papua. Kehadiran mereka tidak mampu diatasi dengan tepat oleh pemerintah provinsi sehingga justru menimbulkan persoalan tersendiri. Sesungguhnya reaksi mereka terhadap pemerintah adalah potret umum orang Papua dalam merespon tindakan represif dan ketidakpercayaan yang menguat terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya untuk mengajak mereka kembali ke kota studi hingga kini masih menimbulkan perdebatan. Apalagi ketika terkesan adanya mobilisasi tanpa sosialisasi. Bahkan apabila dilakukan penanganan yang tidak tepat dapat menjadikan mereka sebagai alat, *kambing hitam* juga komoditi dalam situasi konflik di Papua.
4. Penembakan, Kontak Tembak dan Transaksi Amunisi
 - a. Konflik kekerasan di Nduga terkait peristiwa penembakan di distrik Yigi tanggal 2 Desember 2018 yang menelan korban jiwa para pekerja proyek dari PT Istaka Karya tidak mampu diselesaikan hingga akhir tahun 2019 : kematian dan pengungsian warga sipil karena operasi pengejaran terhadap kelompok pelaku serta rangkaian peristiwa kekerasan lainnya. Situasi ini diperburuk dengan penanganan pengungsi yang tidak tepat, temuan mayat 5 orang warga Nduga yang diduga korban tembak pada tanggal 20 September 2019³ serta penembakan terhadap seorang supir di Nduga pada 20 Desember 2019 ataupun sikap wakil bupati Nduga yang menyatakan mengundurkan diri meski hingga kini belum ada respon dari pemerintah. Aparat kepolisian mencoba melakukan penangkapan terhadap 5 orang warga Nduga yakni : Lines Tabuni, Pren Tabuni, Muthihut Lokbere, Lohot Hiluka dan Pedi ditangkap di Hom-Hom Wamena tanggal 30 Maret 2019 atas tuduhan kepemilikan amunisi. Diamankan di Polsek Hom-Hom dan selanjutnya dibawa ke Polres Jayawijaya di Wamena. Setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Wamena, maka ke lima orang tersebut dibebaskan. Sebagian dari mereka terlibat dalam penanganan pengungsi Nduga di Wamena. Pada bulan Mei, aparat kepolisian menangkap MG atas tuduhan terlibat pada peristiwa Nduga. Penangkapan terhadap MG, seolah menjadi tumbal dari peristiwa Nduga akibat belum tertangkapnya pelaku utama. Berlarutnya penyelesaian konflik Nduga dan penanganan dampak dari konflik tersebut khususnya pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan dari para pengungsi menunjukkan sikap pemerintah yang tidak serius dalam menangani permasalahan kemanusiaan yang dihadapi masyarakat sipil di Nduga.

³ Narasumber : Informasi via WhatsApp dari Theo Hasegem, 11 Desember 2019

- b. Penembakan dan kontak tembak meningkat sepanjang tahun 2019. Kepolisian Daerah Papua mencatat 23 kasus penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di beberapa wilayah di Provinsi Papua. Kapolda Papua Iren Paulus Waterpauw menjelaskan rangkaian penembakan tersebut menyebabkan 20 korban meninggal dunia terdiri dari 8 anggota TNI, 2 anggota Polri dan 10 orang masyarakat sipil.⁴ Kapolda menyebut ada teror penembakan yang dilakukan KKB di wilayah Puncak Jaya, Jayawijaya, Mimika dan Paniai. **(Lampiran 3 : Tabel Peristiwa Penembakan/Kontak Tembak tahun 2019).**
- c. Aparat melakukan pengawasan, penangkapan dan proses hukum terhadap sejumlah masyarakat sipil terkait dengan perdagangan amunisi secara ilegal. Meskipun ada dugaan bahwa telah terjadi perdagangan amunisi atau senjata yang masuk dari luar Papua (Indonesia) untuk mendukung gerakan perlawanan bersenjata di Papua namun dari sejumlah perkara yang telah disidangkan di beberapa Pengadilan Negeri di Papua diketahui bahwa amunisi tersebut merupakan produk PT Pindad (Produk Indonesia) yang digunakan oleh Polisi dan TNI. Proses hukum hanya berfokus pada pelanggaran yang telah dilakukan terdakwa sebagai masyarakat sipil karena memiliki, menguasai dan membawa amunisi sedangkan sumber atau pemberi atau penjual amunisi atau motif dari berpindahkannya amunisi produk PT Pindad dari TNI atau Polri ke masyarakat, hanya sebagian saja yang mampu diungkapkan atau ditindaklanjuti.
- d. Jakub Fabian S (JFS) warga Negara Polandia dituduh dan dipidana melakukan makar bersama dengan Simon Magal (SM), atas tuduhan melakukan transaksi senjata namun tidak dapat dibuktikan di persidangan, lantas JPU dan majelis menggunakan *chat* antara JFS dan SM untuk menjerak keduanya sebagai pelaku makar. JFS ditangkap di Wamena, diperiksa di Jayapura kemudian dibawa kembali ke Wamena tanggal 2 November 2018 dan dititip di tahanan Polres Jayawijaya. JPU menuntut dengan 10 tahun penjara dan majelis hakim memberikan hukuman 5 tahun penjara tanggal 2 Mei 2019. JFS dan JPU mengajukan banding dimana putusan Banding menguatkan putusan PN Wamena.. Kemudian JFS dan JPU mengajukan kasasi dimana MA memutus JFS dengan 7 tahun penjara. Hingga kini JFS masih berada di tahanan Polres Jayawijaya di Wamena. Meski JFS seharusnya sudah menjadi penghuni Lapas Wamena namun pihak Lapas Wamena tidak bersedia menerima JFS dengan alasan keamanan dan sedang mengajukan permohonan perpindahan lokasi pemidanaannya. Sejak ditangkap, menjalani pemeriksaan hingga pembacaan putusan, JFS menolak semua tuduhan JPU. JFS dituduh bertemu dengan KNPB dan kelompoknya untuk membuat tulisan dan mengkampanyekan gerakan Papua merdeka. JFS menolak sebab sebelumnya telah banyak orang yang bertemu dan membuat tulisan tentang KNPB namun tidak dikenakan makar.

⁴ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50939005>

5. Dinamika Gerakan Radikal dan Konflik Horizontal.

- a. Sejak peristiwa Tolikara pada 2015, potensi konflik horizontal meningkat terutama dengan menggunakan isu agama. Beberapa kelompok berpaham radikal diduga telah hadir di Papua, salah satunya dengan kehadiran kelompok Jafar Umar Thalib (JUT). Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Keerom terkait dengan kehadiran kelompok Jafar Umar Thalib (JUT) di Arso 14 Kabupaten Keerom, dinilai tidak jelas apalagi setelah kematian bupati Keerom pada Januari 2018. Nampak bahwa sikap pemerintah yang awalnya sangat tegas dengan berbagai upaya lisan dan teguran resmi, kini seolah memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi kelompok JUT sehingga menimbulkan kekhawatiran munculnya konflik horizontal. Terbukti dengan aksi JUT pada tanggal 27 Pebruari 2019 di Koya Barat Kota Jayapura menyebabkan ketegangan hubungan antar umat beragama meningkat. JUT ditangkap bersama 6 anak buahnya ditahan dan diperiksa di Polda Papua, disidangkan di PN Makasar sejak 12 Juni 2019 dengan nomor perkara Nomor 808/PID.Sus/2019/PN MKS atas tuduhan UU Darurat karena memiliki samurai dan pengrusakan namun saat divonis 16 Juni 2019 hanya terkait kasus pengrusakan, JUT divonis 5 bulan penjara. Beberapa bulan setelah keluar penjara, tanggal 25 Agustus 2019 JUT meninggal dunia di Jakarta. Adapun tuduhan terkait UU Darurat karena memiliki 2 samurai yang menjadi barang Bukti di Pengadilan, nyaris luput dari pertimbangan oleh Majelis Hakim. Hal ini sangat berbeda ketika orang asli Papua ditangkap karena membawa sajam dalam ukuran kecil sekalipun, misalnya pisau, dinyatakan melanggar hukum dan dihukum dengan hukuman yang lebih tinggi.
- b. Pada Mei 2019, Polda Papua menyatakan ada 2 daerah yang dicurigai sebagai lokasi latihan terorisme jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Lampung pimpinan SL alias Abu Faiza yang ditangkap Densus 88/Antiteror di Papua yakni Keerom dan Merauke.⁵ Namun pada pertemuan AIDP dengan Kepala Kesbangpol Kabupaten Kerrom pada Juni 2019, Kepala Kesbangpol Keerom menyatakan bahwa pihak pemkab telah mengecek ke lokasi yang dimaksud namun tidak ditemui tanda-tanda bahwa lokasi tersebut digunakan sebagai tempat latihan JAD. Pada awal desember 2019, Densus 88 Atiteror Polri menangkap 8 terduga teroris di kabupaten Jayapura, diduga merupakan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Lampung-Medan.⁶ Papua digunakan sebagai wilayah baru yang relatif aman sebagai tempat persembunyian karena status mereka sebagai DPO dan juga diduga sebagai lokasi untuk memulai mencari pekerjaan baru ataupun untuk *fundrising* dengan mengembangkan sejumlah unit usaha. Beberapa tempat masih perlu diwaspadai mengenai kemungkinan adanya kelompok radikal karena mekanisme dekteksi yang masih sangat lemah baik yang dimiliki oleh aparat keamanan ataupun masyarakat setempat.

6. Pilpres dan Pileg 17 April 2019

- a. Di beberapa wilayah khususnya di daerah pegunungan, pelaksanaannya hanya dilakukan untuk DPRD kabupaten setempat sedangkan untuk DPRP, DPR RI dan DPD akan ditentukan oleh caleg dan penyelenggara pemilu. Adapun pilpres, suara langsung dibungkus(diserahkan) untuk paslon nomor 1. Pemilihan berlangsung tanpa asas JURDIL

⁵ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48183946>

⁶ <https://www.liputan6.com/news/read/4138106/polri-terduga-teroris-jadikan-papua-tempat-perluasan-perjuangan>

dihadapan penyelenggara dan aparat keamanan namun sepanjang pemilihan dapat berlangsung aman alias tidak ada konflik maka meskipun terjadi kecurangan tidak ada yang bersedia mengungkapkannya dengan alasan khawatir akan terjadi konflik atau mengancam jiwa aparat atau penyelenggara. Pileg dan pilpres di beberapa lokasi membutuhkan waktu lebih dari sehari bahkan ada yang sempat tertunda seperti di Nduga karena konflik yang berlanjut sejak akhir tahun 2018. Kemudian hanya dilaksanakan di Keneyam, ibu kota Kabupaten karena di kampung-kampung masyarakat sudah mengungsi.

b. Sistem noken terus menjadi polemik, praktek sistem noken dinilai telah melanggar asas demokrasi modern. Juknis KPU mengenai penggunaan sistem noken tidak dilaksanakan dengan benar. Seruan untuk menghapus system noken menguat. Pernyataan dari walikota Jayapura pada saat perayaan natal Tabi di kabupaten Jayapura mengenai perlunya menghapus sistem noken⁷, mendapatkan beragam respon serta memicu bergulirnya aliansi untuk menghapus system noken terutama di kalangan tokoh Papua pesisir.

7. Wacana mengenai pemekaran provinsi Papua mencuat tajam di tahun 2019 setelah kunjungan 61 tokoh Papua ke Jakarta yang kemudian dipertegas dengan beberapa pernyataan dari Menteri Dalam Negeri(Mendagri), Tito Karnavian. Mendagri memastikan satu dari dua provinsi baru di Papua akan dinamai Papua Selatan sebagaimana disampaikan usai berkunjung ke Papua mendampingi Presiden Joko Widodo. Pernyataan ini tentu saja mengundang reaksi yang besar karena wacana pemekaran tiba-tiba saja dimunculkan sebelum dilakukan kajian sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun kemudian mendagri seolah meralat dengan menyatakan bahwa pembentukan sebuah calon daerah otonomi baru (DOB) tidak begitu saja ditindaklanjuti atau disetujui, namun memerlukan proses dan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku. ⁸ Pemekaran menjadi satu strategi yang digunakan untuk meredam aspirai Papua merdeka oleh elit Jakarta. Hal ini dipertegas dengan kata kunci yang dipakai oleh Mendagri yakni berdasarkan analisa data intelejen dan demi kepentingan keamanan dan persatuan bangsa. ⁹ Pemekaran juga menjadi ruang yang digunakan oleh elit-elit Papua untuk merebut kekuasaan(kembali). Sehingga secara 'situasional' pemekaran provinsi menjadi jawaban atas keresahan para elit yang khawatir akan kehilangan kekuasaan bertemu dengan ketakutan pemerintah jakarta atas menguatnya ideologi Papua merdeka pasca aksi rasis terhadap rakyat Papua. Hingga saat ini belum ada sosialisasi dan diskusi yang terbuka dengan berbagai pihak terutama berbagai kelompok masyarakat di wilayah-wilayah yang ditargetkan untuk dimekarkan.

IV. Ekosob dan Pelayanan Publik

1. Pendidikan :

a. Konflik bersenjata di Nduga, Papua menyebabkan anak-anak kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Diperkirakan lebih dari 700 anak pengungsi Nduga yang berada di Wamena terpaksa belajar di sekolah darurat semi permanen yang dibangun para relawan di halaman Gereja Weneroma Wamena. Hingga kini koordinasi diantara tim Relawan dengan pemerintah Nduga, Jayawijaya dan pusat belum menyepakati formulasi

⁷ <https://reportasepapua.com/btm-kami-tidak-minta-merdeka-kami-hanya-minta-sistem-noken-dihapuskan/21-Desember-2018>

⁸ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48183946>

⁹ <https://www.liputan6.com/news/read/4099267/mendagri-tito-sebut-pemekaran-papua-situasional>

yang tepat untuk pemenuhan hak anak-anak Nduga atas pendidikan yang layak.¹⁰ Adapun kegiatan belajar mengajar di Keneyam ibukota kab Nduga baru terjadi pada bulan desember 2019. Hal ini diketahui saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengunjungi SD Inpres Keneyam dan SMPN 1 Keneyam, Kabupaten Nduga, Papua, Selasa (15/10/2019). Pengungsi yang bersekolah merupakan warga dari delapan distrik/kecamatan di Nduga Di SD Inpres Keneyam, terdapat 195 pengungsi yang telah bersekolah di situ sejak Desember 2019.¹¹

- b. Kompleksitas masalah pendidikan terjadi di banyak tempat di Papua salah satu masalah utama adalah kekurangan tenaga guru. Misalnya menurut Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggara Pendidikan DPRD Merauke menyebutkan sejumlah masalah yang dihadapi guru seperti perumahan guru belum memadai (jumlah dan kuantitas), biaya perjalanan dinas guru dibebankan kepada guru, guru terlambat ke tempat tugas ataupun tidak berada di tempat tugas karena mengikuti kuliah atau juga hanya saat mau ujian. Selain itu masalah ruang kelas yang tidak mencukupi atau gedung sekolah tidak terawat dengan baik. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak transparan serta jaranganya pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Termasuk ketidakhadiran siswa karena masalah orang tua hingga masih ditemukannya siswa sekolah dasar yang masuk ke sekolah menengah pertama tidak dapat membaca dan menulis dengan baik.¹² Presentasi Pansus ini merupakan potret dunia pendidikan di Papua bukan saja di wilayah Pegunungan tetapi juga di sebagian wilayah pesisir.
- c. Kegiatan belajar mengajar juga belum berjalan maksimal di beberapa tempat terjauh dan terpencil meskipun di tempat tersebut tidak terjadi konflik. Misalnya di Agats, kepala kampung Buetkwar, Yustinus mengatakan layanan pendidikan di SD Inpres Buetkwar merupakan potret buruknya pengelolaan pendidikan dasar di pedalaman Asmat. Sekolah tutup berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, walaupun sekolah buka, hanya satu dua minggu, sesudahnya tutup kembali karena para guru tidak menetap di Buetkwar.¹³ Demikian juga di Kampung Bine, Asmat. Kepala Sekolah Dasar Kampung Bine Yustinus Kaize menyampaikan bahwa, bangunan sekolah yang sudah tua dan tak layak untuk digunakan. Tenaga guru yang sangat minim. Guru-guru muda yang lebih senang hidup di Kota dan juga sebagian pergi mendaftar menjadi PNS yang hingga kini tak lagi datang ke sekolah. Sedangkan guru honor dan kontrak tidak mengajar karena belum terima gaji.¹⁴ Maka ketika kepala Dinas Pendidikan kabupaten Mimika menyatakan akan menarik guru-guru PNS dari sekolah swasta (Sabtu, 13 Juni 2019) dikecam oleh Uskup Keuskupan Timika, Mgr. John

¹⁰ Bdk, Kompas.com. <https://makassar.kompas.com/read/2019/08/05/06150011/konflik-bersenjata-pendidikan-700-an-anak-pengungsi-nduga-di-papua?page=all>

¹¹ Kompas.com. Mendikbud: Ada Ketimpangan Pendidikan di Wamena dan Nduga Dibandingkan Daerah Lain. <https://regional.kompas.com/read/2019/10/15/14525531/mendikbud-ada-ketimpangan-pendidikan-di-wamena-dan-nduga-dibandingkan-daerah>. 15/10/2019, 14:52 WIB.

¹²Bdk, <https://suara.merauke.go.id/post/603/puluhan-masalah-penyelenggaraan-pendidikan-kabupaten-merauke-dibahas-di-dewan.html>. Diupload pada Kamis, 06 Februari 2019.

¹³ Bdk, <https://www.kompasiana.com/petruspitsupardijilung/5d3d57bb097f360c9a417912/sd-inpres-buetkwar-potret-buruknya-pendidikan-di-pedalaman-asmata?page=all#sectionall>

¹⁴Bdk, <https://www.kompasiana.com/petruspitsupardijilung/5cd531656db843036137ef84/guru-yustinus-kaize-dan-sekolah-yang-reot-di-bine?page=all>

Philip Saklil,Pr mengingat bahwa jumlah sekolah swasta lebih banyak dari sekolah negeri dan sangat berkontribusi bagi pendidikan di Mimika. Oleh karenanya apabila kebijakan penarikan guru PNS dilakukan, maka akan lebih banyak generasi orang asli Papua akan kehilangan masa depan yang baik.¹⁵

- d. Kekurangan tenaga guru juga disampaikan oleh Bupati Kab. Biak Numfor, Herry Ario Naap. Menurutnya kab. Biak masih terdapat kekurangan sebanyak 800 tenaga guru di berbagai jenjang pendidikan di wilayah tersebut. Masalah kekurangan tenaga Guru di wilayah Kabupaten Biak adalah karena adanya guru yang purna tugas sebagai ASN, selain itu juga ada sebagian guru yang mutasi ke beberapa daerah karena mengikuti suami yang pindah tugas, serta Formasi tenaga guru yang diberikan sangat sedikit. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara diminta agar memperbanyak formasi guru pada seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil formasi 2019.¹⁶ Hal yang sama terjadi di Merauke, Wakil Bupati Merauke Sularso, menegaskan, ada lebih dari 2 ribu tenaga didik di Merauke, namun hanya 916 tenaga didik yang bersertifikasi. Idealnya di Merauke harus memiliki 4016 guru.¹⁷ Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Mappi, animo anak-anak untuk mengenyam pendidikan sangat tinggi, ada sekitar 30.000 siswa sedangkan tenaga guru menjadi masalah serius karena sangat minim.¹⁸ Pemkab Mappi kemudian berkerjasama dengan Fisipol UGM melakukan program Guru Penggerak Daerah Terpencil (GPDT).
- e. Pemerintah berupaya menyelesaikan permasalahan pendidikan di Papua dengan merekrut guru-guru lokal dan guru-guru dari program SM3T (Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal) dan GGD (Guru Garis Depan). Namun rekrutmen guru-guru lokal menghadapi masalah sebab mayoritas bertitel di bawah strata satu (S1). Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 mencatat sebanyak 41,11 persen guru sekolah dasar di Papua masih bertitel di bawah S1, padahal rata-rata nasionalnya hanya 14,01 persen. Selain itu menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Kemdikbud, muncul kendala karena 90% anak dari daerah terpencil terutama Papua tidak bisa berbahasa Indonesia hanya menguasai bahasa ibu. Akibatnya proses belajar mengajar terhambat. Guru SM3T dan GGD tidak menguasai bahasa daerah Papua, sementara peserta didiknya tidak mampu menggunakan bahasa Indonesia.¹⁹ Pada beberapa tempat kekosongan tenaga guru diisi oleh prajurit TNI-AD. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano mengatakan, kekosongan tenaga pendidik di wilayah

¹⁵Bdk, You.Markus.2019. Kebijakan Tarik Guru di Mimika, Uskup Saklil: Ini Kejahatan Manusia.

<https://suarapapua.com/2019/07/19/kebijakan-tarik-guru-di-mimika-uskup-saklil-ini-kejahatan-kemanusiaan/>. 19 Juli 2019. Diupdate pukul 5.53, dan diakses 05 februari 2020. Pukul 01.45)

¹⁶ Mushidin, 2019. *Pemkab Biak Numfor Masih Kekurangan 800 Tenaga Guru*. <https://www.antaraneews.com/berita/1042370/pemkab-biak-numfor-masih-kekurangan-800-tenaga-guru> Pukul 13.33. *diupdate*)

¹⁷ Bdk, KabarPapua. Mutu Pendidikan di Kabupaten Merauke Belum Maksimal. Jumat, 04 Oktober 2019. <https://kabarpapua.co/mutu-pendidikan-di-kabupaten-merauke-belum-maksimal/>. Diapload pada Kamis, 06 Februari 2020. Pukul 22:59.

¹⁸ Adetya Yani.2019. Dorong Partisipasi Publik, Guru Tugas di Pedalaman Ingin Semua Pihak Perhatikan Pendidikan di Papua. <https://www.iglobalnews.co.id/2019/01/dorong-partisipasi-publik-guru-tugas-di-pedalaman-ingin-semua-pihak-perhatikan-pendidikan-di-papua/>. Diakses 05 Januari 2019. Diupdate 05 Februari 2020 pukul. 02.14.

¹⁹ Haryadi.Dadi. 2019 Artikel ini sudah Terbit di AyoBandung.com, dengan Judul Pendidikan Berkualitas: Solusi Membangun Papua, pada URL <https://www.ayobandung.com/read/2019/09/15/63719/pendidikan-berkualitas-solusi-membangun-papua>. 15 September 2019. Diakses pada 05 Februari 2020 Pukul 01.59).

3T akan diatasi dengan melibatkan prajurit TNI-AD dengan mengirim sebanyak 900 prajurit yang telah menerima pelatihan mengajar pada Mei 2019.²⁰ Kebijakan ini masih menjadi polemik di Papua. karena sejumlah aksi kekerasan atau kontak tembak antara TNI dan kelompok sipil bersenjata di Papua sehingga menimbulkan rasa takut dan trauma bagi masyarakat sipil. Oleh karenanya penyelesaian masalah pendidikan perlu diubah, misalnya pembelajaran membaca, menulis dan menghitung (calistung) harus menjadi prioritas di sekolah tingkat dasar. Memprioritaskan dan memberikan ijin dengan kondisi tertentu kepada guru untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi mengajar agar pelayanan pendidikan dapat tetap dijalankan dengan baik serta tingkat partisipasi sekolah makin tinggi.

2. Pembangunan bidang kesehatan sebagai salah satu pelayanan dasar dan prioritas masih jauh dari harapan banyak orang. Di mulai dari pelayanan yang dilakukan pada rumah sakit utama yakni RSUD Dok II Jayapura hingga di sejumlah Puskesmas. Misalnya disinyalir bahwa Puskesmas di Papua, masih kekurangan sekitar 60 persen tenaga dokter. Dari data terakhir terkuak, hanya sekitar 40 persen tenaga dokter yang aktif dari sebanyak 270 Puskesmas yang ada di Kabupaten/Kota se-Papua. Sehingga pelayanan kesehatan di daerah perkampungan maupun pedesaan, belum dilakukan secara optimal oleh Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Ada sekitar 100-an lebih puskesmas yang belum ditangani langsung oleh dokter. banyak timbul berbagai kasus penyakit. Contohnya, penyakit muntaber di Wamena, yang hingga saat ini telah berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB), dengan jumlah pasien yang terkena wabah ada sekitar 1000-an jiwa dan sekitar 100-an lebih jiwa meninggal dunia. Selain itu, ada penyakit campak di Asmat, kemudian, kasus kekurangan pangan di Yahukimo, dan kasus-kasus lainnya yang memberikan kesan bahwa lambatnya penanganan masalah kesehatan dari Pemerintah Daerah. Dibutuhkan sekitar 40 dokter per 100.000 jumlah penduduk. Artinya dengan besaran jumlah penduduk yang ada di Papua, yaitu kurang lebih 2,5 juta penduduk, maka Papua membutuhkan sekitar 800-an dokter untuk menangani masalah kesehatan di Papua.²¹ Meski banyak gagasan besar yang direncanakan untuk mengatasi keterbatasan akses layanan kesehatan namun pada prakteknya masih sulit untuk diwujudkan, Seperti yang diprogramkan oleh Dinkes Nduga Inovasi Layanan Kesehatan Melalui Puskesmas Udara dengan menggunakan helikopter untuk mengatasi sulitnya jangkauan pelayanan kesehatan ke daerah terisolir.²² Namun nyatanya tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat sipil yang pergi meninggalkan kampungnya karena ketakutan.
3. Tanah, hutan dan investasi kembali menjadi isu yang mencuat di tahun 2019. Diawali pada Januari ketika peristiwa penangkapan 57 kontainer kayu yang transit di Pelabuhan Makassar kemudian disita oleh Petugas Gakkum KLHK sebelum diberangkatkan ke Surabaya, Jawa Timur. Diperkirakan kayu berasal dari Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, dan juga dari sorong.²³ Aktor yang terlibat makin beragam seperti pengusaha Pemegang HPH, Perusahaan Pengekspor, Pengusaha Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu

²⁰Bdk, BUdianto.Anang.2019. Pendidikan di Tanah Papua butuh Solusi Luar Biasa. <https://mediaindonesia.com/read/detail/222642-pendidikan-di-papua-butuh-solusi-luar-biasa>. Humaniora: diupdate 13 Maret 2019 pukul 10.4 diakes pada 05 Februari 2019, Pukul 02:42.

²¹ <https://www.papua.go.id/view-detail-berita-600/undefined>

²² <https://www.papuabangkit.com/2019/11/28/dinkes-nduga-inovasi-layanan-kesehatan-melalui-puskesmas-udara/>

²³<https://www.jawapos.com/jpg-today/16/03/2019/klhk-diminta-usut-kasus-kayu-ilegal-asal-papua/>

(IPK), Pengusaha Pemilik Sawmil, Penggesek Kayu dan Masyarakat secara khusus kepala suku akibatnya penanganan yang tuntas masih sulit dicapai apalagi ketika ada oknum aparat keamanan atau pemerintah yang turut 'melindungi'. Demikian juga terkait konflik agraria terkait klaim kepemilikan, Kepala Pertanahan Kota Jayapura Roy E.F Wayoi mengatakan banyak status tanah tanpa dokumen.²⁴ Akibatnya klaim ganti rugi pun tidak tuntas. Misalnya ketika Tim Advokasi Masyarakat Adat Tabi meminta bantuan Presiden RI Joko Widodo untuk membantu penyelesaian sengketa tanah adat masyarakat Tabi dengan PT. Bintang Mas karena masih ada klaim soal kepemilikan tanah dari pembangunan Jembatan Holtekamp, Kota Jayapura dan Perumahan Rakyat di kampung Netar, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Selain itu permohonan ganti rugi datang dari Gerson Hassor, Kepala Suku Hassor yang mengklaim sebagai pemilik tanah yang dibangun Jembatan Merah sehingga memohon keadilan.²⁵ Proyek Pembangunan berskala besar mulai mengancam keberadaan hutan dan masyarakat adat di Papua. Misalnya untuk investasi, ribuan hektar hutan rakyat telah dikuasai oleh para pengusaha terutama untuk perkebunan kelapa sawit. Dimana prosedur pemberian konsensi masih tumpang tindih dan upaya pemantauan dari pemerintah tidak cukup efektif.²⁶ Masalah penambangan ilegal di beberapa kabupaten seperti Yahukimo, Boven Digoel dan di daerah pedalaman Deguwo, Kabupaten Paniai terus menimbulkan konflik dan korban jiwa memperburuk pemenuhan hak-hak ekosob. Tarik menarik mengenai status kepemilikan dan jenis usaha seringkali melibatkan masyarakat setempat hingga rentan konflik diantara mereka. Hal lain yang menjadi masalah adalah kepemilikan hak ulayat laut dari masyarakat pesisir terkait pengakuan dan ganti rugi karena keterbatasan nomenklatur hukum agraria nasional yang tidak mengenal hak ulayat laut.

V. Isu Dialog

Setelah presiden Jokowi 15 Agustus 2017 mengundang para tokoh Papua untuk bertemu di Istana Merdeka dan menunjuk Menkopolkam, Kepala Kantor Sekretariat Presiden dan Koordinator JDP sebagai *Person in Charge (PiC)* untuk menginisiasi 'Dialog Sektoral', namun sepanjang tahun 2018, tidak ada langkah yang signifikan untuk mendukung dilakukannya dialog. Di tahun 2019, akibat dari meningkatnya aksi kekerasan, polemik mengenai dialog menguat kembali, ada desakan untuk berdialog dari berbagai pihak, meskipun sejumlah pihak juga menolak gagasan tersebut. Desakan untuk berdialog belum mampu ditindaklanjuti melalui berbagai agenda konkrit. Masing-masing pihak memunculkan ide mengenai dialog namun belum sejalan dengan gagasan dari pihak lain. Misalnya usai aksi anti rasis yang berakhir dengan anarkis, presiden Jokowi dalam satu kesempatan merespon desakan mengenai dialog. Pernyataan tersebut kemudian direspon balik oleh Benny Wenda (ULMWP) dengan menyampaikan sejumlah syarat dialog, sayangnya, sejak itu diskusi mengenai dialog justru terhenti, tidak ada yang mulai mengambil inisiatif secara terbuka untuk memulai tahapan dialog.

Selain itu usai aksi rasis dan anti rasis serta anarkis, menjadi momentum untuk bertemu presiden, cukup banyak perwakilan dari dan atas nama Papua yang bertemu dengan presiden termasuk

²⁴ <https://www.jubi.co.id/ini-sebab-banyak-terjadi-sengketa-tanah-di-papua/>

²⁵ <https://www.m.wartaplus.com/read/6849/Persoalan-Sengketa-Tanah-di-Papua-Presiden-Diminta-Bantu-Masyarakat-Adat>

²⁶ The sixth report of the International Coalition for Papua (ICP) provides covering events from January 2017 until December 2018 an analysis of violations from January 2017 until December 2018 and an overview of developments in 2019.

pertemuan dengan 61 tokoh Papua. Namun pertemuan demi pertemuan lebih bersifat ruang rekognisi dan kompetisi dengan menyuarakan agenda-agenda pembangunan yang cenderung pragmatis tanpa membahas atau mendorong secara serius mengenai proses hukum yang adil, review kebijakan keamanan, rekonsiliasi yang dimulai dari basis termasuk mengenai gagasan dialog menuju Papua tanah damai. Hal ini menunjukkan potret kegagalan pemerintah dalam membangun dialog yang inklusif mengenai soal-soal mendasar di Papua dengan melibatkan berbagai komponen di Papua.

VI. TANTANGAN dan REKOMENDASI TAHUN 2020

1. TANTANGAN

- a. Tidak adanya investigasi yang netral dan penyelesaian yang komprehensif terhadap sejumlah peristiwa aksi rasis, aksi anti rasis dan anarkis sepanjang tahun 2019 termasuk peristiwa di Nduga yang terjadi tahun 2018 akan meningkatkan ketidakpercayaan dari masyarakat sipil terutama para korban dari rangkaian peristiwa tersebut terhadap pemerintah serta mendorong terbentuknya segregasi berbasis etnis (papua dan non Papua) dan 'ideologi'. Selain itu berkembangnya sentimen negative terhadap etnis tertentu (gunung/Nduga). Sehingga akan berimplikasi terhadap kohesi sosial diantara masyarakat sipil serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, termasuk di Nduga.
- b. Masih kuatnya dimensi politik dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua dikarenakan negara menghindar dari tanggungjawab dan kewajibannya untuk mencegah impunitas dan pemenuhan hak-hak korban khususnya untuk kasus Wasior 2001, Wamena 2003, Paniai 2014 dan dugaan kasus pelanggaran HAM lainnya. Namun tuntutan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM di Papua makin sulit dihindari, termasuk eksternalisasi isu Papua. Apalagi ketika pola represif dan pendekatan keamanan dalam menangani aksi kebebasan berekspresi terus dipraktekkan oleh negara.
- c. Pendekatan keamanan yang menjadi prioritas berbanding lurus dengan meningkatnya aksi kekerasan terutama kekerasan bersenjata atau kontak tembak antara aparat keamanan RI dan kelompok bersenjata dalam upaya menangkap pelaku kekerasan di Nduga serta di beberapa tempat lainnya. Juga berpotensi bagi tumbuhnya gerakan perlawanan(bersenjata) dan menyebar di wilayah-wilayah di pegunungan. Sejalan dengan itu tindakan represif dan penangkapan terhadap masyarakat sipil akan meningkat terutama atas tuduhan terlibat atau membantu KKB. Sehingga siklus kekerasan masih sulit untuk diakhiri.
- d. Penegakan hukum belum memenuhi rasa keadilan para korban terutama terkait dengan aksi rasis, anti rasis dan anarkis sehingga stigmatisasi dan persekusi masih menjadi alat yang digunakan untuk menghakimi seseorang atau kelompok tertentu untuk membangun *gap* dan permusuhan antara negara dan masyarakat atau diantara kelompok masyarakat.
- e. Penyelenggaraan pemilu tidak berkualitas mulai dari Keputusan penyelenggara pemilu yang tidak netral, perilaku peserta pemilu/partai politik yang tidak bersikap jujur, adanya dugaan

money politik, keterlibatan ASN, intervensi aparat keamanan. Juga praktek sistem noken yang tidak disertai dengan juknis dan pengawasan yang tegas akan menimbulkan 'ketidakpercayaan' yang tinggi terhadap hasil pemilu. Apalagi tanpa adanya sanksi yang jelas maka pelanggaran akan tetap menjadi pola yang berulang untuk memenangkan kontestasi politik.

- f. Kebijakan terkait perlindungan hutan, air dan sumber daya alam lainnya yang masih berorientasi pada kepentingan penguasa atau investor akan terus memicu perlawanan dari masyarakat adat bahkan berpotensi meluas dengan melibatkan aparat keamanan sehingga konflik sumber daya alam yang berimplikasi politik, makin sulit untuk dihindari.

2. REKOMENDASI

- a. Upaya penegakan hukum yang professional dan imparial tidak saja terhadap peristiwanya atau dampak yang ditimbulkan akan tetapi penting untuk dilakukan memperhatikan implementasi dari aturan yang ada bahkan perubahan ditingkat UU. Selain itu mengedepankan Investigasi yang akurat terhadap rangkaian peristiwa yang diduga telah terjadi pelanggaran HAM termasuk peristiwa Nduga secara independen untuk mempertanggungjawab perbuatan yang telah dilakukan dan memberikan keadilan bagi korban.
- b. Review kebijakan keamanan di Papua dimulai dari 1). Mekanisme komando dan koordinasi terkait operasi yang dilakukan oleh aparat keamanan gabungan 2). Penempatan pasukan untuk penanganan konflik, penanganan terkait aksi massa, penanganan pengamanan proses hukum atau persidangan, 3). Keterlibatan aparat keamanan dalam pembangunan infrastruktur 4). Distribusi dan pertanggungjawaban penggunaan amunisi 5). Peran atau keterlibatan dalam pemerintahan sipil di Papua.
- c. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang tepat dengan memperhatikan hak hidup masyarakat, pekerja, ekosisten dan masyarakat setempat sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat. Selain itu berkorelasi langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat serta tetap terpenuhinya rasa aman. Termasuk review aturan yang melibatkan aparat keamanan khususnya TNI dalam pembangunan infrastruktur di Papua.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa berorientasi pada sistem dan fungsi birokrasi yang dijalankan secara professional. Mensinergiskan peran pusat dan daerah melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal. Menyediakan berbagai fasilitas layanan publik yang memadai serta kemampuan untuk merespon cepat dan tepat berbagai permasalahan yang ada, memaksimalkan pengawasan internal (program dan anggaran), sangat dibutuhkan. Termasuk dengan memberikan sanksi yang tegas bagi ASN yang lalai dalam menjalankan tanggungjawabnya.
- e. Netralitas dari penyelenggara pemilu, ASN dan aparat keamanan serta penegakan hukum harus dilakukan tanpa toleransi bagi siapapun pelanggar pemilu yang dilakukan secara

profesional dan tuntas serta mereview praktek sistem noken diawali dengan profesionalisme dalam melakukan pendataan penduduk.

- f. Memelihara sikap yang non diskriminasi, tanpa stigma dan menghilangkan aksi-aksi yang provokatif ataupun persekusi baik yang dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum ataupun diantara berbagai komponen masyarakat sipil.
- g. Membuka dialog yang strategis untuk menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang terjadi di Papua. Memperbanyak inisiatif diantara pemerintah dan masyarakat (kelompok agama dan etnis) dan antar masyarakat untuk membangun ruang komunikasi yang humanis dan inklusif. Menghentikan mobilisasi, strukturisasi maupun kelembagaan yang berbasis pada kekuatan keamanan dengan memperkuat peran penyelenggaraan pemerintahan, institusi penegak hukum dan pemberdayaan masyarakat sipil yang mandiri, toleran dan demokratis.

Jayapura, 5 Februari 2020

Aliansi Demokrasi Untuk Papua (AIDP)

Lampiran 1
Tabel Peristiwa Penangkapan tahun 2019 Terkait Isu Papua
 (AIDP-dihimpun dari berbagai sumber)

Tanggal / Tempat	Ditangkap	Ditetapkan Tersangka	Dugaan Perbuatan Pelaku	Keterangan
8 Januari 2019	6	3	kasus makar	Kasus ini bermula dari penyelenggaraan kegiatan perayaan ibadah syukuran hari HUT KNPB Timika yang dilakukan 31 Desember 2018. ²⁷
31 Maret 2019	5	-	Kepemilikan amunisi dan terlibat peristiwa Nduga Desember 2018	5 warga Nduga ditangkap di Hom – Hom Wamena. Setelah di BAP di Polres Jayawijaya di Wamena, kelimaanya dibebaskan tanggal 1 April karena polisi tidak memiliki cukup bukti. Ada dugaan target yang mau ditangkap lolos saat dilakukan pengejaran di lokasi yang sama dengan 5 orang tersebut saat ditangkap. ²⁸
12 Mei 2019	5	1	Keterlibatan pada peristiwa di Nduga Desember 2018	Dari 5 orang yang ditangkap, 1 orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Mispo Gwijangge. Setelah menjalani pemeriksaan dan penahanan di Polres Jayawijaya, Mispo Gwijangge dipindahkan ke Jakarta untuk menjalani persidangannya. ²⁹
15 Agustus 2019	198	2	Pemalsuan dokumen dan membawa senjata tajam (pisau), aksi tanda Ijin	Aksi menolak perjanjian <i>New York</i> sekaligus mendukung pembahasan isu Papua dalam Forum Kepulauan Pasifik (PIF) yang sedang berlangsung di Tuvalu, Pasifik Selatan, 13-16 Agustus 2019. Aksi ini dilakukan di beberapa daerah seperti (Kota/Kab Jayapura, Surabaya, Malang, Maluku, dan Maluku Utara). Masih terkait aksi tersebut, polres Jayapura menangkap Bazoka Logo Kepala Biro Politik ULMWP yang bertanggungjawab atas Aksi Damai Komite Aksi ULMWP pada tanggal 15 Agustus 2019 di Polresta Jayapura atas tuduhan pemalsuan dokumen. Kemudian menangkap Benny

²⁷ <https://www.bantuanhukum.or.id/web/sewenang-wenang-menerapkan-pasal-makar-dalam-penanganan-knpb-akan-menyuburkan-siklus-represi-di-papua/>

²⁸ Data Koalisi Masyarakat Sipil Papua untuk Semua (Komasi)

²⁹ Ibid badingkan <https://www.google.co.id/mp/s/www.ceposonline.com/2020/01/26/kontak-tembak-di-intan-jaya-satu-anggota-kkb-dikabarkan-tewas/amp/>

				Siep dengan tuduhan membawa senjata tajam/pisau. Bazoka dituntut 3 tahun penjara oleh JPU dan diputus 1 tahun oleh Majelis Hakim di PN Jayapura. Sedangkan Benny Siep dituntut 8 bulan penjara oleh JPU dan diputus 5 bulan oleh majelis hakim di PN Jayapura. ³⁰
19 Agustus 2019	20	20	Penghasutan, melawan aparat, perusakan, pembakaran, dan pencurian	Pasca demo anti rasisme yang dilakukan pada 19 Agustus 2019 di Papua Barat Polisi telah menangkap dan menetapkan 20 tersangka kerusuhan di Papua Barat dengan rincian : Manokwari 10 orang, Sorong 7 orang dan Fak – Fak 3 orang ³¹
21 Agustus 2019	34	10	Penghasutan, melawan aparat, perusakan, pembakaran, pencurian, dan membawa senjata tajam	10 orang ditetapkan sebagai tersangka, 2 orang diantaranya masih berstatus anak sehingga dibebaskan di tingkat kepolisian sehingga sisa 8 orang. Kemudian Polres Mimika menanggihkan 5 dari 8 orang sehingga tersisa 3 orang yakni Rico Warensi dan Terianus Medlama yang dituduh terlibat saat aksi tersebut serta Nius Wenda atas tuduhan penggunaan senjata tajam. ³²
28 Agustus 2019	30	14	Penghasutan, melawan aparat, perusakan dan pembakaran	Setelah melakukan pemeriksaan 14 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari 14 tersangka 5 orang diantaranya mendapat penangguhan penahanan dari Bupati Deiyai pada bulan September. 9 orang ditahan di Polres Paniai, kemudian dipindahkan ke Polres Nabire dan Polres Jayapura selanjutnya dikembalikan ke Nabire. Kini sedang menjalani persidangan di PN Nabire. ³³
	8	6	Makar	Massa aksi mengibarkan bendera Bintang Kejora yang dibawa saat aksi di depan Istana Negara pada 28 Agustus 2019. Massa aksi memprotes aksi rasialisme yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. ³⁴
28 Agustus 2019	64	28	Penghasutan, melawan aparat, Perusakan, pembakaran,	Mereka yang ditangkap diduga terlibat dalam aksi demo anti rasisme di Jayapura pada 29 Agustus 2019. Selanjutnya secara berturut-turut aparat melakukan penangkapan juga terhadap sejumlah aktifis

³⁰ Data Koalisi Masyarakat Sipil Papua untuk Semua (Ko Masi Papua) bandingkan <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/aktivis-papua-ditangkap-08152019114816.html>

³¹ <https://www.jubi.co.id/polisi-tetapkan-20-tersangka-demo-tolak-rasis-berujung-anarkis-di-papuabarat/>

³² Data Koalisi Masyarakat Sipil Papua untuk Semua (Ko Masi Papua) pendampingan Timika

³³ Data Koalisi Masyarakat Sipil Papua untuk Semua (Ko Masi Papua) pendampingan Deiyai

³⁴ <https://tirto.id/siklus-rasisme-terhadap-mahasiswa-papua-egA4>

			pencurian, dan makar	demokrasi kemudian atas tuduhan makar sebanyak 7 orang yakni Fery Kombo, Alexander Gobai, Irwanus Uropmabin, Hengki Hilapok, Buktar Tabuni, Agus Kossay dan Steven Itlay. ³⁵
	2	2	Penyebar Hoax dan penghasutan	Polda Jawa Timur menangkap dan menetapkan Tri Susanti dan SA (ASN Pemkot Surabaya) sebagai dalang dari penyerbuan Asrama Mahasiswa di Surabaya. ³⁶ Keduanya disidangkan di PN Surabaya dan masing-masing diputus 7 bulan penjara untuk Tri Susanti dan 5 Bulan penjara untuk Syamsul Arifin.
2 September 2019	1	1	Makar	Sayang Madabayan (perempuan) ditangkap di Bandara Rendani Manokwari oleh Tim Pengamanan Security Bandara Rendani Manokwari karena kedatangan membawa 1.500 bendera bintang kejora berukuran kecil. Polisi juga menyita spanduk dan kaos yang dianggap memuat konten provokatif. ³⁷
18 September 2019	4	4	Makar	Memproduksi dan membagikan pamphlet berisi gambar bendera Bindang Kejora dengan kalimat "Referendm, Papua Merdeka" saat aksi protes anti rasisme di Kota Sorong. ³⁸
19 September 2019	3	3	Makar	Mengkorganisir aksi protes anti rasisme di Manokwari pada tanggal 3, 6, dan 11 September 2019. Saat aksi ada beberapa orang yang mengibarkan bendera bintang kejora. ³⁹
19 September 2019	24	-	Tidak ada surat ijin keramaian	Ibadah syukuran dan bakar batu dibubarkan paksa oleh pihak Kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolres Mimika. Selain melakukan pembubaran paksa, pihak Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap 23 mahasiswa dan seorang karyawan LEMASA dengan alasan kegiatan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari pihak Kepolisian. ⁴⁰ Mereka kemudian dibebaskan tanggal 20 September 2019 pukul 16.24 WP dan didampingi kuasa hukum Ko Masi Papua

³⁵ ibid

³⁶ <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190903135655-12-427124/tri-susanti-dan-asn-tersangka-rasial-asrama-papua-ditahan>

³⁷ <https://tirto.id/siklus-rasisme-terhadap-mahasiswa-papua-egA4>

³⁸ <https://www.amnesty.id/surat-terbuka-tentang-meningkatnya-penggunaan-penetapan-tersangka-berdasarkan-pasal-makar-terhadap-aktivis-papua-untuk-membungkam-kebebasan-bereksperesi/>

³⁹ Suarapapua.com

⁴⁰ Laporan LEMASA

23 September 2019	733	13	Penghasutan Melawan aparap, Perusakan dan Menggangu ketertiban umum	Awalnya mahasiswa Eksodus berkumpul di Auditorium Uncen rencana mereka akan menggunakan auditorium sebagai posko mahasiswa eksodus namun tidak diijinkan. Setelah dilakukan negosiasi dan kesepakatan mereka diantar kembali ke gedung kebudayaan di Expo Waena dengan menggunakan kendaraan roda dua dan truk yang difasilitasi oleh aparat keamanan sesampai di jembatan expo terjadi saling lempar sehingga rusuh. Terjadi penangkapan, intimidasi dan intimidasi. ⁴¹ Ada korban meninggal dari aparat keamanan dan mahasiswa. Terjadi tindakan represif dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat keamanan.
	19	16	Penghasutan, melawan aparap, perusakan, pembakaran, dan pencurian	Awalnya kepolisian menetapkan 13 orang sebagai tersangka. Dari 13 orang yang ditetapkan 10 orang telah ditangkap dan 3 orang lainnya yang dianggap sebagai dalang sehingga masih menjadi DPO. Selain itu 10 orang yang ditangkap beberapa orang lainnya masih berstatus sebagai pelajar. ⁴² Kemudian secara berturut-turut polisi melakukan penangkapan sehingga setidaknya kini ada 16 orang akan dan sedang menjalani proses hukum di PN Wamena. ⁴³
1 Oktober 2019	2	2	Ujaran Kebencian	2 warga Mimika, Papua terancam hukuman enam tahun penjara setelah memposting di Facebook ujaran kebencian berupa penghinaan kepada Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto. ⁴⁴
4 Oktober 2019	1	1	Penyebaran hoax	Berawal dari dugaan kasus keracunan yang dialami oleh Orang Asli Papua. Ada yang menyebarkan info terkait kasus keracunan, pihak Polres Timika menduga info yang disebar adalah hoaks. Penyebar ini kemudian dicari dan buron dihargai 25 juta perkepala, karena dianggap menggangu ketertiban. ⁴⁵
26	1	-	Terkait	Philipus Robaha wakil ketua SONAMAPA

⁴¹ Data Koalisi Masyarakat Sipil Papua untuk Semua (Ko Masi Papua)

⁴² Ibid

⁴³ Data Koalisi Masyarakat Sipil Papua untuk Semua (Ko Masi Papua)

⁴⁴ Ibid bandingkan <https://www.google.co.id/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20191014/16/1158713/polda-papua-tangkap-pelaku-penyebar-hoaks-keracunan-makanan-di-timika-papua>

⁴⁵ Ibid bandingkan <https://www.google.co.id/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20191014/16/1158713/polda-papua-tangkap-pelaku-penyebar-hoaks-keracunan-makanan-di-timika-papua>

November 2019			selebaran ajakan aksi 1 Desember	ditangkap oleh Kepolisian dari Polsek Dok 8. Penangkapan terjadi di Koya Barat (Rumah Mertuanya). Penangkapan terkait selebaran ajakan aksi 1 Desember yang mana ada nama dan tanda tangannya. Lalu dibebaskan 27 November 2019. ⁴⁶
30 November 2019	1	-	Terkait selebaran seruan ibadah syukuran 1 Desember	Surat panggilan telah dilakukan sejak 26 November 2019 tetapi Markus Haluk (Ketua Eksekutif ULMWP) baru bisa memenuhi panggilan tanggal 30 November dan didampingi oleh tim kuasa hukum KoMaSi Papua. Pemeriksaan sejak pukul 15.00 – 21.30 WP. Akhirnya 23.44 WP Markus Haluk diperbolehkan kembali ke rumahnya. ⁴⁷
30 November 2019	34	20	Makar	Polres Jayapura menangkap 34 orang tepatnya di depan lampu merah bandara Sentani Kab jayapura. Mereka diduga berencana mengikuti upara peringatan 1 desember 2019 di Jayapura. Ditemukan sejumlah pakaian loreng dengan lambang bendera bintang kejora, senjata tajam dan kartu anggota TPNPB. 14 orang dibebaskan dan 20 orang ditetapkan sebagai tersangka makar. Beberapa hari setelah bupati Jayapura bertemu dengan Kapolres Jayapura, mereka diberikan penangguhan penahanan yakni tanggal 20 desember 2019. Bagi Tim PH, saat itu mereka 'bebas demi hukum' karena dihari yang sama sebenarnya masa penahanan mereka untuk 20 hari pertama berakhir, tanpa surat perpanjangan. Maka Polres Jayapura diminta untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan(SP3) bagi mereka. ⁴⁸
1 Desember 2019	73	41	Makar	Aksi 1 Desember di beberapa daerah di Papua Barat seperti Fak – Fak 54 orang yang ditangkap dan 23 orang dijadikan sebagai tersangka, Manokwaari 8 orang yang ditangkap dan 7 orang dijadikan tersangka, dan di Sorong 11 orang ditangkap dan dijadikan tersangka. ⁴⁹

⁴⁶Data Koalisi Masyarakat Sipil Papua untuk Semua (Ko Masi Papua)

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Instagram jubi.co.id

1 Desember 2019	4	-	Membawa Bendera Bintang Kejora saat Ibadah	4 orang yang diduga berstatus mahasiswa ditangkap di dalam gereja di daerah Abepura, Jayapura tanggal 1 desember 2019 sekitar pukul 10.30 WIT. Keempat orang tersebut bersinisial MY, DT, PZH, dan ED. Mereka membawa tiga bendera Bintang Kejora pada misa ke-II di gereja tersebut yang dimulai pada pukul 08.00 WIT. ⁵⁰ Setelah diinterogasi, mereka dibebaskan.
-----------------------	---	---	--	--

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah penangkapan yang selama 2019 yaitu:

- Ditangkap : 1.272 orang
- Ditetapkan TSK : 180 orang (3 orang DPO)
- Pasal Makar : 86 orang
- Penangguhan Pasal Makar : 20 orang
- Penangguhan Aksi Rasis : 10 orang

⁵⁰ *Loc cit*

Lampiran 2
Tabel Daftar Tersangka/Terdakwa Terkait Aksi Anti Rasis tahun 2019 di Papua
 (AIDP-dihimpun dari berbagai sumber)

A. Daftar Nama Keseluruhan Tersangka /Terdakwa

TANGGAL PENANGKAPAN	No	NAMA TERSANGKA	TEMPAT KEJADIAN
15 Agustus 2019	1	Bazoka Logo	Jayapura
	2	Beni Siep	Jayapura
21 Agustus 2019	1	Riko Wariensi	Timika
	2	Eli Dolame Alias Ely	Timika
	3	Yermin Gombo Alias Timi	Timika
	4	Teminus Wenda	Timika
	5	Maikel Gombo	Timika
	6	Urbanus Juka Alias Urbanus Tabuni Alias Banus	Timika
	7	Nius Wenda Alias Nius	Timika
	8	Teryanus Medlama	Timika
28 Agustus 2019	1	Andreas Douw;	Deiyai
	2	Mikael Bukege;	Deiyai
	3	Simon P.Ukago;	Deiyai
	4	Yupen Pekey;	Deiyai
	5	Stepanus Goo;	Deiyai
	6	Melianus Mote Alias Bule;	Deiyai
	7	Yos Iyai Alias Yos;	Deiyai
	8	Stepanus Pigai	Deiyai
	9	Alex Pakage	Deiyai
29 Agustus 2019	1	Dolvius Hisage	Jayapura
	2	Mikha Asso	Jayapura
	3	Yusuf Marten Moai	Jayapura
	4	Yali Loho	Jayapura
	5	Oktovianus Hisage	Jayapura
	6	Mikhael Hilapok	Jayapura
	7	Yoni Weya	Jayapura
	8	Welem Walilo	Jayapura
	9	Luis Boswai	Jayapura
	10	Rovinlis	Jayapura
	11	Ari Asso	Jayapura
	12	Yan Piter Sroyer/Surumaja	Jayapura
	13	Ferius Entama	Jayapura
	14	Aesus Mohi	Jayapura
	15	Dohi Kowene	Jayapura
	16	Persiapan Kogeya	Jayapura

	17	Falerio Yaas	Jayapura
	18	Yogky Ayomi	Jayapura
	19	Aldi Tabuni	Jayapura
	20	Immanuel Hubi	Jayapura
	21	Elo Hubi	Jayapura
	22	Agustinus L Mohi	Jayapura
	23	Ronal Wandik alias Ron	Jayapura
	24	Lanti Nipsan	Jayapura
	25	Piter Merauje	Jayapura
	26	Rufinus Tambanop	Jayapura
	27	Padra Wenda	Jayapura
	28	Yosam Wenda	Jayapura
	29	Asri hidayat	Jayapura
	30	Darwis dahlan	Jayapura
	31	Budiman alias budi	Jayapura
	32	Jamaluddin	Jayapura
	33	Irwansyah	Jayapura
5 September 2019	1	Feri Bom Kombo	Jayapura
	2	Alexsander Gobay	Jayapura
9 September 2019	3	Buktar Tabuni	Jayapura
12 September 2019	4	Irwanus Uropmabin	Jayapura
	5	Hengki Hilapok	Jayapura
	6	Steven Itlai	Jayapura
14 September 2019	7	Agus Kossay	Jayapura
17 September 2019	8	Doni Itlai	Jayapura
23 September 2019	1	Assa Asso	Jayapura
	2	Abraham Dote	Jayapura
	3	Yogi Wenda	Jayapura
	4	Jembrif Kogoya Alias Timi	Jayapura
	5	Elimus Bayage Alias Eli	Jayapura
	6	Yandu Kogoya	Jayapura
	7	Maya Kamarigi	Jayapura
	8	Bedira Tabuni	Jayapura
	9	Biko Kogoya Alias Yali Kogoya	Jayapura
	10	Alpon Meku	Jayapura
	11	Pailes Jigibalon Alias Iles	Jayapura
	12	Tenak Waker Alias Despin	Jayapura
	13	Abua Yikwa	Jayapura
23 September 2019	1	Aderson Uwaga	Wamena
	2	Ruben Esema	Wamena
	3	Paben Jikwa	Wamena
	4	Ricky Wanimbo	Wamena
	5	Weya	Wamena
	6	Novli Yohame	Wamena
2 Oktober 2019	7	Aibun Kogoya	Wamena
3 Oktober 2019	8	Yohanes Payage	Wamena
5 Oktober 2019	9	Samuel Kurisi	Wamena
7 Oktober 2019	10	Lucky Elopere	Wamena

8 Oktober 2019	11	Pilatus Pahabol	Wamena
11 Oktober 2019	12	Teresta Tega Iyaba	Wamena
13 Oktober 2019	13	Natius Tabuni	Wamena
	14	Daud Matuan	Wamena
17 Oktober 2019	15	Jawa Wetipo	Wamena
	16	Manu Marlon Alya	Wamena
21 Oktober 2019	17	Konius Doga	Wamena
23 Oktober 2019	18	Elieser Siep	Wamena
13 November 2019	19	Sonny Yando	Wamena

B. Tersangka Makar Yang Dipindahkan dan Disidangkan di PN Balikpapan Kaltim

No	Nama Tersangka	Tanggal Ditangkap	Tanggal Ditahan	Status
1	Fery Kombo	5 September 2019	7 September 2019	Masih ditahan
2	Alexander Gobay	5 September 2019	7 September 2019	Masih ditahan
3	Buctar Tabuni	9 September 2019	10 September 2019	Masih ditahan
4	Hengki Hilapok	11 September 2019	12 September 2019	Masih ditahan
5	Irwanus Uropmabin	11 September 2019	12 September 2019	Masih ditahan
6	Steven Itlay	11 September 2019	12 September 2019	Masih ditahan
7	Agus Kosay	17 September 2019	18 September 2019	Masih ditahan

- Para tersangka ditangani oleh beberapa Tim Penasehat Hukum, salah satunya adalah Tim PH Koalisi Penegak Hukum - Koalisi Masyarakat Slpil Papua untuk Semua. (Ko Masi Papua).
- Perkara para terdakwa peristiwa 15 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019 sebagian besar telah diputus oleh Majelis Hakim di PN Jayapura. Sementara sidang untuk yang lainnya masih berlangsung di PN Nabire, PN Timika, PN Wamena dan PN Jayapura.
- Persidangan 7 Tapol Papua di Balikpapan kaltim dimulai tanggal 11 Pebruari 2020 di PN Balikpapan Kaltim.

Lampiran 3
Tabel Peristiwa Penembakan/ Kontak Tembak di Papua pada 2019
(AIDP-dihimpun dari berbagai sumber)

HARI/ TANGGAL	TEMPAT KEJADIAN	KORBAN PENEMBAKAN	PELAKU PENEMBAKAN	KETERANGAN
Senin, 28 Januari 2019	Bandara Mapendum, Kabupaten Nduga	Prajurit TNI dari satuan Yonif Raider Kostrad 751/VJS, Praka Nasrudin tewas tertembak dan Praka Muhammad Rifai Pagesa tertembak ditangan	KKB	Korban tewas dan korban luka dari pihak TNI akibat tertembak oleh pihak KKB pada saat melakukan pengamanan Bandara Pesawat yang mengangkut rombongan Bupati Kabupaten Nduga Yarius Gwijangge, Kadistrik Mapenduma Toni Gwijangge dan Kadistrik Kagayam Jonatan Kogoya itu juga membawa logistik/Bama sebanyak 1.100 Kg sebagai bantuan sosial warga Mapenduma, Kabupaten Nduga (https://regional.kompas.com/read/2019/01/28/17432241/rombongan-bupati-Nduga-diserang-anggota-kkb-1-prajurit-tni-gugur)
Kamis, 31 Januari 2019	Distrik Mapendum, Kabupaten Nduga	1 prajurit Prada Laode Majid luka tembak dibahu kanan.	TNI dari Raider dari Yonif (Batalyon infantri) 751 dengan TPNPB Egianus Kogoya	Pengawalan Bupati Nduga mendapat penyerangan dari KKB sehingga 1 anggota TNI terkena luka tembak dibahu kanan dan dari pihak KKB ada yang tertembak namun belum diketahui berapa jumlah orang yang tertembak karena pihak aparat TNI hanya menemukan beberapa bercak darah ditempat kedudukan KKB, indikasi aparat TNI (https://regional.kompas.com)

Sabtu, 2 Februari 2019	Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya	1 warga sipil yaitu: Sugeng Efendi tewas ditembak	OTK (orang tak dikenal)	Sugeng sedang menonton film bersama temannya di HP dan tiba-tiba Sugeng tertembak, masih sempat hidup sampai akhirnya meninggal di RSUD Mulia (https://nasional.okezone.com)
Senin, 5 Februari 2019	Lanny Jaya	Warga sipil tertembak yakni Jerry Jigibalom dan Nelius Tabuni	Polisi	Pemicunya karena perselisihan diatas motor antara Jerry yang sedang mabuk dengan Erens serta istri dari Erens, karena gertakan yang dilakukan Jerry sehingga menyebabkan istri Erens ketakutan dan pingsan, sehingga Erens melapor ke polres dan polisi mengejar Jerry dan menembak Jerry, lalu teman-teman Jerry datang untuk melempar Polres namun Kapolres memerintahkan anggotanya untuk menembak, polisi menembak teman-teman Jerry dan tembakan terkena Nelius Tabuni teman dari Jerry (Yayasan Teratai Hati Papua(YTHP))
Senin, 12 Februari	Pasar Sinak, Kabupaten Puncak Jaya	Anggota TNI, a.n Pratu SN	OTK (orang tak dikenal)	Pada waktu berbelanja Pratu SN sibuk menawar sampai akhirnya terpisah dari rekan-rekannya dan saat itu SN ditodong dan ditembak dengan senjata api (https://www.bbc.com)
Sabtu-Minggu, 26-27 Februari 2019	Distrik Yal, Kabupaten Nduga	-	TNI/Polri dengan KKB	Jubir TPNPB Sebby Sambom melalui media sosial mengatakan telah terjadi kontak senjata mulai tengah malam tanggal 26 Februari 2019 sampai tanggal 27 Februari 2019 di Distrik Yal, Kabupaten Nduga, Papua antara KKB dengan militer dan polisi Indonesia. Namun berita tersebut dibantah oleh pihak Kodam XVII Cenderawasih dengan menerangkan bahwa fakta yang sebenarnya adalah bahwa sekitar pukul 14.40 WIT, tanggal 26/2/2019 bertempat di Kampung Yal, Distrik

				Yal, Kabupaten Nduga, Papua, gerombolan separatist pimpinan EK telah melakukan pembakaran 1 unit ekskavator milik PT Istaka Karya yang sudah tidak beroperasi lagi (http://aceh.tribunnews.com/2019/02/24/opm-akan-tembak-warga-non-papua-yang-tak-mau-tinggalkan-Nduga-ini-7-ultimatum-untuk-indonesia)
Kamis, 7 Maret 2019	Distrik Mugi, Kabupaten Nduga	3 prajurit Kopassus tewas yaitu: Serda Mirwariadin, Serda Yusdin, dan Serda Siswanto Bayu Aji	KKB dengan Kopassus	Satgas Nanggala sedang melakukan pengamanan di Bandara Mugi pada jalur pergeseran pasukan keamanan pembangunan Trans Papua terlibat kontak senjata dengan KKB (https://papua.inews.id)
Rabu, 20 Maret 2019	Distrik Mugi, Kabupaten Nduga	3 anggota Brimob tewas yaitu: Bharada Aldy, Ipda Arif Rahman dan Bharada Rafiq Fitrah Kurniawan	KKB dengan Satgas Belukar Brimob Mabes Polri	Melakukan pengamanan pesawat heli di Bandara Mugi dan terlibat kontak senjata dengan KKB (https://papua.inews.id)
Selasa 15 April 2019	Jayapura	3 warga sipil tertembak yaitu: Apner Kaigere (43), Andi Hengga (36), dan Niko Kaigere	Polisi	Penembakan terjadi karena masalah keluarga. Sehingga polisi bripta berinisial AK melakukan penembakan (detiknews.com)
Selasa-Rabu, 23-24 April 2019	Kabupaten Nduga	5 anggota TNI tewas dan 3 orang mengalami luka.	TPN-OPM dan TNI/Polri	Terjadi kontak senjata selama 2 hari antara TPN-OPM dengan TNI/Polri di Distrik Yal dan Distrik Nitkuri Kabupaten Nduga. Dalam kontak Senjata itu, dua anggota TNI tewas berstatus tentara wanita, dan hari ini tanggal 24 April 2019, telah terjadi kontak senjata lagi di Kampung Neriladobo, Distrik Nitkuri, yang menewaskan 3 anggota TNI dan 3 lainnya terluka. Kontak senjata dipimpin oleh Panglima Komando Daerah

			<p>Pertahanan III Egianus Kogeya⁵¹. Sementara kantor berita <i>Antara</i> melaporkan, dua anggota TNI mengalami luka tembak saat sedang melakukan pengiriman logistik ke Distrik Nirkuri, Kabupaten Nduga, Papua, Rabu. Salah satunya kru helikopter Bell 412 milik Penerbad yakni Serda DK. Berdasarkan informasi yang terhimpun oleh <i>Antara</i>, penembakan itu terjadi sekitar pukul 11.10 WIT yang juga mencederai Prada MZ anggota Yonif Raider 321/GT. Insiden penembakan itu berawal saat helikopter milik Penerbad dengan pilot Mayor CPN Agus Falah, sedang melakukan pengiriman logistik ke Distrik Nirkuri. Namun, tiba-tiba sekelompok orang bersenjata menembaki personel hingga mengenai Prada MZ pada bagian kaki kirinya. Saat hendak mengevakuasi korban MZ, terjadi lagi penembakan hingga mengenai punggung Serda DK. Kepala Penderangan Kodam XVII Cenderawasih Kol Inf Muhamad Aidi mengakui adanya penembakan hingga melukai dua anggota TNI saat pengiriman logistik atau bahan makanan ke Distrik Nirkuri. Namun kondisinya stabil dan saat ini masih dalam penanganan tim dokter di RS Mitra Masyarakat Timika (https://www.suara.com)</p>
--	--	--	---

⁵¹Bdk. <https://www.suara.com/news/2019/04/24/213547/dua-hari-kontak-senjata-opm-5-tni-tewas-2-di-antaranya-tentara-perempuan>

<p>Senin 13 Mei 2019</p>	<p>Distrik Mugi, Kabupaten Nduga</p>	<p>Seorang TNI bernama Pratu Kasnun tewas tertembak</p>	<p>KKB</p>	<p>kontak tembak antara TNI dan KKB di Distrik Mugi. Akibat kejadian tersebut, seorang TNI bernama Pratu Kasnun gugur karena mengalami luka tembak di bagian punggung. TNI memastikan, KKB yang memulai aksi tersebut berasal dari kelompok pimpinan Egianus Kogoya. Insiden penyerangan itu bermula saat 12 orang prajurit TNI sedang melakukan patroli pengamanan terkait proses pembangunan Trans Papua sekitar pukul 11.15 Wit siang tadi. Namun tiba-tiba para personel TNI itu diserang oleh KKSBB pimpinan Egianus Kogoya. "Saat tim patroli TNI berada di sekitar Lapangan Terbang (Lapter) distrik Mugi Kabupaten Nduga, secara mendadak mendapatkan serangan dari arah ketinggian oleh pihak KKSBB yang berhasil diidentifikasi dari kelompok pimpinan Egianus Kogoya (https://news.detik.com/berita/d-4547581/1-prajurit-tni-gugur-ditembak-kksb-saat-amankan-pembangunan-trans-papua)</p>
<p>Selasa, 21 Mei 2019</p>	<p>Waghete, Deyai</p>	<p>2 orang warga sipil tertembak yaitu: Yulius Mote tewas tertembak di bagian kepala belakang tembus mata dan Elianus Dogopia tertembak di bagian paha dan masih hidup</p>	<p>Polisi</p>	<p>4 orang warga Waghete mabuk dan melakukan pemalangan terhadap supir angkutan umum untuk meminta uang, supir lapor polisi dan polisi datang lalu menembak Elianus. Warga marah dan melakukan penyisiran serta melepaskan tembakan dan gas air mata. Tembakan yang dikeluarkan polisi mengenai Yulius Mote sehingga Yulius meninggal (tabloidjubi.com)</p>
<p>Senin, 27 Mei 2019</p>	<p>Distrik Fayit, Kabupaten Asmat</p>	<p>5 orang warga sipil tertembak. 4 orang tewas dan 1 orang dirawat</p>	<p>Polisi</p>	<p>Amukan massa karena dipicu oleh tidak terpilihnya seorang calon legislatif yang didukung oleh warga, sehingga menyebabkan kericuhan, namun pihak aparat kepolisian mengamankan situasi dengan</p>

				menggunakan tembakan sehingga, 5 orang tertembak akibat pengamanan represif yang dilakukan pihak aparat (www.rmolbanten.com)
Minggu, 2 Juni 2019	Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke	1 warga sipil tewas, Yohan Moiwend	Polisi	Penembakan terjadi karena pelaku dan korban sedang minum minuman keras dan terjadi salah paham, hingga akhirnya terjadi penembakan yang dilakukan oleh Brigpol RK (detiknews.com)
Kamis, 4 Juli 2019	Distrik Mugi, Kabupaten Nduga	4 orang ibu-ibu dan seorang anak perempuan yang berumur 1 tahun lebih. Ibu Kenmalet Gwijangge tewas ditempat.	TNI/Polri	penembakan yang dilakukan aparat Gabungan TNI/Polri terhadap 4 orang ibu-ibu dan seorang anak perempuan yang berumur 1 tahun lebih. Penembakan ini terjadi ketika para ibu ini pergi ke kebun Peyonggo, Kampung Muruldumu (daerah perbatasan antara Distrik Mugi, Nduga dan Kwijangge, Lany Jaya) untuk menggali ubi. Sementara mereka sedang menggali ubi dikebun Peyonggo, disekitar pinggir kali Gul. Tiba-tiba Anggota Gabungan TNI/POLRI datang dengan sembunyi-sembunyi lalu melakukan penembakan dengan membabi buta ke arah ibu-ibu yang sedang menggali ubi di kebun. Akibat tembakan ini Ibu Kenmalet Gwijangge tertembak mati lalu terlentang jatuh di kebun. Setelah melihat peristiwa itu ketiga temannya melarikan diri ke jurang tanpa perhatikan anak yang digedong oleh Korban Ibu Kenmalet Gwijangge. Sampai sekarang keluarga belum mengetahui keberadaan anak tersebut (Data Tim Relawan untuk Nduga, Juli 2019)
Sabtu, 20 Juli 2019	Kabupaten Nduga	1 orang TNI tewas	KKB dan TNI	Pihak KKB melakukan penyerangan kepada pihak TNI yang sedang

				beristirahat, lalu pihak TNI menyerang balik sehingga terjadi baku tembak antara pihak TNI dan KKB (Kompas.com)
Selasa 23 Juli 2019	Distrik Mugi, Kabupaten Nduga	-	KSB dan TNI	Kelompok separatis bersenjata (KSB) melakukan penyerangan terhadap TNI. Pihak TNI melakukan penyerangan balasan, namun dalam baku tembak ini tidak ada korban yang tewas (https://news.okezone.com)
Senin, 12 Agustus 2019	Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua	anggota Polisi yakni Briptu Hedar	KKB	Senin siang, 12 Agustus 2019, pukul 11.00 WIT. Saat berboncengan motor dengan rekannya Bripta Alfonso Wakum, Hedar dipanggil oleh seseorang yang mengaku temannya di Kampung. Saat itu, Hedar minta Alfonso untuk memberhentikan kendaraannya. Ia pun turun dari motor dan menghampiri teman yang tadi memanggilnya. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal menuturkan saat hendak mendekat ke orang yang memanggilnya tadi, tiba-tiba 6-8 orang keluar dari semak-semak dan langsung menyeret korban. "Alfonso yang mengetahui kejadian itu melarikan diri dan langsung melaporkan kejadiannya ke Pos Koga, Kabupaten Puncak," kata Kamal. Sesaat setelah kejadian, aparat gabungan langsung melakukan penyisiran ke lokasi. Dalam penyisiran tak ditemukan Hedar. Namun, pukul 17.30 WIT jenazahnya ditemukan tergeletak tak jauh dari lokasi kejadian. Hedar ditembak dengan 3 peluru bersarang di tubuhnya (https://www.liputan6.com/regional/read/4036220/briptu-hedar-gugur-

				saat-menjaga-nkri-di-ilaga-papua)
Jumat, 16 Agustus 2019	Mbua, Kabupaten Jayawijaya	1 orang anggota TNI, Pratu Sirwandi tewas tertembak di dada dan perut.	KSB (kelompok separatis bersenjata)	Terjadi penghadangan pengangkut logistik Satgas Pamrahwan di jalan Trans Wamena-Habema oleh KSB dan terjadi penembakan yang dilakukan KSB kepada TNI (https://regional.kompas.com)
Jumat, 23 Agustus 2019	Wamena, Kabupaten Jayawijaya	1 orang tewas, anggota KKB bernama Yusia Wandik	Polisi	Anggota kepolisian menembak mati anggota dari KKB yang bernama Yusia Wandik (https://kompas.id)
Rabu, 28 Agustus 2019	Kabupaten Deyai, kantor Bupati	Warga sipil tewas tertembak, 2 orang terluka. 1 personel TNI tewas terkena panah, 1 personel Brimob dan 3 personel Samapta Polres Paniai terluka terkena panah.	TNI/ Polri	aksi berakhir anarkis, diduga dipicu oleh mobil yang memasuki tempat massa aksi dari arah belakang dan menabrak salah seorang massa hingga meninggal. Aparat TNI-Polri dan Brimob mengalami luka-luka dan 1 anggota TNI tewas terkena panah. Ada juga korban dari masyarakat sipil/setempat. Menurut laporan dari Pastoran Deyai, ada 9 orang warga sipil yang meninggal dunia.
Minggu, 1 September 2019	Abepura, Kota Jayapura	2 Warga tertembak, 1 tewas dan 1 orang korban dalam perawatan di RSUD Abepura serta 13 orang lainnya terluka.	Gabungan Brimob dan TNI/Polri	Pertikaian antar masyarakat sipil. Aparat keamanan mencoba untuk meleraikan, namun aparat menggunakan senjata api untuk meleraikan sehingga akibat tembakan yang dikeluarkan aparat menyebabkan 2 orang terkena tembakan (https://www.suara.com)
Selasa, 17 September 2019	Kampung Olen, Distrik Mabugi	3 warga sipil tewas dan 4 lainnya mengalami luka tembak	TNI/Polri dan KKB	Kontak senjata antara kelompok kriminal bersenjata (KKB) dengan tim gabungan TNI-Polri terjadi di Kampung Olen, Distrik Mabugi (https://regional.kompas.com/read/2019/09/18/15375201/kontak-senjata-kkb-dengan-tni-polri-3-warga-tewas-4-terluka?page=all)
Jumat, 20 September	Gunung Kanbobo,	5 warga sipil tewas ditembak terdiri dari	TNI	Penembakan lima warga sipil atas tuduhan sebagian anggota TPN-

2019	Distrik Iniye, Kabupaten Nduga	4 perempuan dan 1 laki-laki yaitu : Yuliance Bugi(25), Yuliana Dorongji(35), Maen Kusumburue(26), Talop Bugi (13) dan Hardius Bugi (15) laki-laki.		OPM dan ternyata setelah diselidiki hanya warga masyarakat sipil, dieksekusi di Gunung Kanbobo Distrik Iniye, Kabupaten Nduga tanggal 20 September 2019. Ke 5 korban dikuburkan disekitar Gunung Kanbobo (Theo Hesegem Dir. Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua dan Pemerhati HAM pegunungan tengah Papua)
Senin, 23 September 2019	Jayapura	4 orang tewas. 3 dari masyarakat sipil dan 1 dari aparat TNI	Gabungan Brimob TNI/Polri dengan massa aksi	Aksi massa anarkis di Jayapura, sehingga menyebabkan kerusuhan, penganiayaan dan penembakan (Kompas.com)
Senin, 23 September 2019	Wamena, Kabupaten Jayawijaya	33 orang tertembak dan diantaranya 10 orang tewas akibat ditembak	Gabungan aparat Brimob, TNI/Polri kontak senjata dengan KKB	Aksi massa anarkis yang terjadi di Wamena, sehingga menyebabkan kerusuhan, penganiayaan dan penembakan (Komnas HAM melalui Tirto.id)
Sabtu, 28 September 2019	Distrik Omukia, Kabupaten Puncak	1 orang tewas ditembak 3 kali	Kelompok kriminal bersenjata (KKB)	Penembakan terjadi disebuah kios di dekat bandara Aminggaru, Ilaga. 2 orang pelaku dari KKB masuk ke kios dan langsung menembak korban sebanyak 3 kali dan kedua pelaku melarikan diri ke sungai Ilame (https://m.detik.com)
Jumat, 25 Oktober 2019	Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya	3 orang tukang ojek tewas yaitu : Rizal (31), Herianto (31), dan La Soni (25)	Kelompok kriminal bersenjata (KKB)	Ketiga pengemudi ojek ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Ketiganya ditemukan dalam kondisi luka tembak dikepala dan luka sayat disekujur tubuh akibat senjata tajam (https://regional.kompas.com)
Jumat, 29 November 2019	Distrik Mugi, Kabupaten Nduga	2 korban tewas dari pihak KKB	TNI Yonif 514 Pos Mugi	Danrem 172/Praja Wira Yakti Kolonel Inf Binsar Sianipar memastikan dua korban tewas tersebut dari kelompok separatis bersenjata saat kontak tembak dengan anggota TNI ketika mengantar logistik. "Pagi ini kami memastikan dua korban tewas yang bukanlah warga biasa melainkan anggota dari kelompok yang terlibat kontak tembak dengan personel TNI dari Yonif 514 Pos Mugi," kata Danrem. Danrem menjelaskan

				<p>kedua warga KKSB yang meninggal ini sering menganggu (kelompok separatis) pada saat TNI beraktivitas di wilayah setempat. Ia menjelaskan kontak tembak TNI antara KKSB itu terjadi pada saat personel melakukan pendorongan logistik di Pos Mugi. Kemudian terdengar suara tembakan, yang kemudian dibalas oleh anggota TNI "Karena mereka mengganggu, ya kita atasi. Tapi, itu dinamika (dalam medan tempur) kejadiannya cuma sebentar, dan memang dari kelompok pengganggu itu ada yang tertembak (https://www.vivanews.com/berita/nasional/21956-danrem-dua-orang-tewas-tertembak-di-nduga-adalah-kelompok-kriminal?medium=autonext)</p>
Sabtu, 30 November 2019	Distrik Tembagapura, Kabupaten Timika	-	Kelompok Separatis pimpinan Hengki Wamang.	<p>Penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal (menurut Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih Kolonel Cpl Eko Daryanto penembakan dilakukan oleh kelompok separatis pimpinan Hengki Wamang) disekitar area pertambangan PT. Freeport Indonesia di area mile 60 RPU 47 kepada kendaraan LWB delta zona dan 2 bis karyawan PT. Freeport (https://regional.kompas.com)</p>
Minggu, 1 Desember 2019	Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya	2 anggota KKB tewas	Aparat gabungan TNI/Polri dan KKB	<p>Kontak tembak antara aparat TNI/Polri dan KKB pimpinan Purn Wenda di Distrik Balingga, Lanny Jaya yang menewaskan 2 orang anggota KKB, aparat mengamankan satu pucuk senjata Revolver (Cepos, 03/12/2019)</p>
Selasa, 17 Desember 2019	Intan Jaya	2 orang anggota TNI tertembak yaitu: Lettu Inf Erizal Zuhri Sidabutar dan Serda Rizky dan	Satgas TNI/Polri dan KKB	<p>Bentrok baku tembak antara TNI-KKB di tiga distrik yaitu distrik Sugapa, distrik Hitadipa, distrik Ugimba Intan Jaya. Yang menewaskan 3 warga sipil dan 2 TNI serta Sekitar 900 keluarga</p>

		juga anggota KKB		mengungsi ke gunung-gunung dan menyebar kesejumlah tempat (CNN Indonesia, 18/12/2019)
Jumat, 20 Desember 2019	Yahukimo	3 warga sipil tertembak yaitu: Fitrik Nepsan (tewas) dan Lefinus Seram (luka tembak) dan Satu anak perempuan usia sekolah	Brimob Polda Papua dan Polisi dari Polres Yahukimo	Penembakan sewenang-wenang yang dilakukan pihak aparat kepada masyarakat sipil (Bdk. Laporan Ko Masi Papua)
Rabu-Minggu, 18-22 Desember 2019	Intan Jaya	TNI/Polri Dan KKB	TNI/Polri dan KKB	Baku tembak antara TPNPB-OPM dan TNI/Polri terjadi karena penembakan membabi buta yang dilakukan oleh TNI/Polri terhadap masyarakat di perkampungan Intan Jaya. TNI/Polri yang tewas ada 8 orang dan 3 helikopter milik TNI/Polri kena tembakan (https://suarapapua.com)
Senin, 12 Desember 2019	Kampung Yeti, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua	2 anggota TNI tertembak yaitu: Serda Miftachur Rohmat tewas tertembak. Dan Prada Juwandhy Ramadhan terluka	KKB	kontak tembak antara TNI dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSBB), saat hendak mengambil logistik di pos Kali Asin, Kampung Yeti, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua. Saat itu personil kita yang berjumlah 10 orang sedang mengambil logistik, namun kemudian dihadang oleh kelompok KKSBB. Terjadi kontak tembak dan satu anggota kita gugur atas nama Serda Miftachur, terkena luka tembak di bagian bahu sebelah kiri. Sedangkan Prada Juwandhy Ramadhan terkena <i>richochet</i> (pantulan) peluru di bagian pipi (https://sp.beritasatu.com/nasional/kontak-tembak-di-perbatasan-ripng-1-prajurit-tni-gugur/592981)

Lampiran 4
Tabel Penambahan Pasukan Tahun 2019
(AIDP-dihimpun dari berbagai sumber)

Tanggal	Jumlah	Asal	Keterangan
Sabtu, 09 Maret 2019	600 Prajurit Kostrad	Batalyon 431 dan Batalyon Zeni Tempur VIII Makasar dan	Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Surawahadi melepas 600 prajurit untuk membantu pengamanan proyek pembangunan Trans Papua. ⁵²
20 Agustus 2019	300 personel Brimob	Polda Sulawesi Tenggara	Dikirim ke Papua dan Papua Barat untuk menjaga keamanan pasca kerusuhan Papua dan Papua Barat. ⁵³
22 Agustus 2019	100 personel Brimob	Polda Maluku Utara	Dikirim ke Papua dan Papua Barat untuk menjaga keamanan pasca kerusuhan Papua dan Papua Barat. ⁵⁴
	100 personel Brimob	Polda Gorontalo	Dikirim ke Papua dan Papua Barat untuk menjaga keamanan pasca kerusuhan Papua dan Papua Barat. ⁵⁵
28 Agustus 2019	300 personil TNI	Mabes TNI	Satuan setingkat kompi dikirim menuju ke Manokwari dan Sorong untuk menambah penagamanan pasca rusuh di Jayapura. ⁵⁶
29 Agustus 2019	300 personel POLRI	Mabes Polri	Dikirim ke Kabupaten Deiyai dan Paniai untuk menjaga keamanan Pasca rusuh. ⁵⁷
Agustus 2019	200 personel Kostrad	Mabes tni	Dikirim ke Papua untuk menjaga keamanan pasca kerusuhan Papua. ⁵⁸
	129 Marinir AU		Dikirim ke Jayapura untuk menjaga keamanan pasca kerusuhan Jayapura. ⁵⁹

⁵² Bdk. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190304071100-20-374266/pangdam-xiv-kirim-600-prajurit-bantu-keamanan-trans-papua>.

⁵³ Bdk. http://rri.co.id/kendari/post/berita/710165/peristiwa/polda_sultra_kirim_dua_ssk_personil_brimob_ke_papua.

<https://papua.antaraneews.com/berita/504292/polda-sultra-kirim-kendaraan-pengurai-massa-di-papua#.XXevSyNW46I.twitter>

⁵⁴ Bdk. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190822090611-20-423632/polda-maluku-utara-kirim-100-personel-brimob-ke-papua>

⁵⁵ Bdk. <https://tribatanews.gorontalo.polri.go.id/polda-gorontalo-kirim-100-personel-brimob-bko-papua-dan-papua-barat/>

⁵⁶ Bdk. <https://www.voaindonesia.com/a/jayapura-rusuh-tni-kirim-300-personil-tambahan-ke-papua-barat/5062407.html>

⁵⁷ Bdk. <https://tirta.id/penambahan-personel-tni-polri-papua-semata-aset-vital-nasional-ehsb>

⁵⁸ Bdk. <https://regional.kompas.com/read/2019/08/30/12055721/200-anggota-kostrad-tni-dikirim-ke-jayapura-apa-yang-diwaspadai>

⁵⁹ Bdk. <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/30/11594941/129-personel-marinir-didatangkan-ke-jayapura>

Agustus 2019	600 personel Brimob	Polda Kalimantan Timur	Dikirim ke Papua, dipimpin oleh Komandan Batalion B Pelopor AKBP Febryanto Siagian untuk menjaga keamanan pasca kerusuhan. ⁶⁰
	500 personel Brimob	Polda Sulawesi Selatan	Dikirim ke Papua untuk menjaga keamanan pasca kerusuhan. ⁶¹
	250 personel Brimob		Dikirim ke Papua untuk menjaga keamanan pasca kerusuhan. ⁶²
	250 personel Brimob	Polda Jambi	Dikirim ke Papua untuk menjaga keamanan pasca kerusuhan. ⁶³
	250 personel Brimob	Polda Kalimantan Barat	Dikirim ke Papua untuk membantu pengamanan pasca-demo rusuh di Jayapura. ⁶⁴
30 Agustus 2019	250 personel Brimob	Polda Kalimantan Selatan	Dikirim ke Papua untuk menjaga keamanan pasca kerusuhan ⁶⁵
30 Agustus	500 anggota Marinir	Mabes TNI	Dikirim ke Papua untuk menjaga alat vital Negara pasca kerusuhan ⁶⁶ .
2019	252 personel Brimob	Polda Kepulauan Riau	Dikirim ke Papua dalam rangka membantu Polda Papua untuk pengamanan unjuk rasa, serta menjaga situasi dan kondisi keamanan di Provinsi Papua dan Papua Barat. ⁶⁷
	100 personel Brimob	Polda Sulawesi Barat	Dikirim ke Papua dalam rangka Bantuan Kendali Operasi (BKO) Polda Papua, untuk memaksimalkan keamanan pasca kerusuhan ⁶⁸
	250 personel Brimob	Polda Sumatra Barat	Dikirim ke Papua dan Papua Barat untuk membantu pengamanan. ⁶⁹
	300 personel Brimob	Polda Kepulauan Riau	Dikirim ke Papua sebagai upaya pengamanan pasca kerusuhan Jayapura. ⁷⁰
1 September 2019	500 personel Brimob	Polda Sumatra Utara	Dikirim ke Papua sebagai upaya pengamanan pasca kerusuhan Jayapura. ⁷¹

Catatan:

- Total Personel berdasarkan tabel yang dihimpun sebanyak 6.031.

⁶⁰ Bdk. <https://radarmalang.id/akbp-febryanto-siagian-pimpin-600-pasukan-brimob-berangkat-ke-papua/>

⁶¹ Bdk. <https://news.detik.com/berita/d-4687571/polda-sulsel-kirim-200-personel-brimob-ke-papua-pasca-kerusuhan..https://www.tagar.id/polda-sulsel-kirim-200-pasukan-tambahan-ke-papua>

⁶² Bdk. <https://news.detik.com/berita/4686999/polda-sumsel-kirim-250-personel-brimob-ke-papua-pasca-kerusuhan>

⁶³ Bdk. https://news.detik.com/berita/d-4687185/250-personel-brimob-dari-jambi-diberangkatkan-ke-papua?tag_from=news_beritaTerkait

⁶⁴ Bdk. <https://regional.kompas.com/read/2019/08/30/14201901/250-personel-brimob-polda-kalbar-dikirim-untuk-amankan-situasi-di-papua>

⁶⁵ Bdk. <https://www.gonews.co/berita/baca/2019/08/30/polda-kalsel-kirim-250-personel-brimob-ke-papua>

⁶⁶ Bdk. <https://tirto.id/penambahan-personel-tni-polri-papua-semata-aset-vital-nasional-ehsb>

⁶⁷ Bdk. <https://regional.kompas.com/read/2019/08/31/07165091/252-personel-brimob-polda-kepri-dikirim-ke-papua>

⁶⁸ Bdk. <https://makassar.tribunnews.com/2019/08/31/polda-sulbar-berangkatkan-100-personel-brimob-ke-papua>

⁶⁹ Bdk. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/19/08/31/px359m428-polri-situasi-di-jayapura-sudah-dikendalikan-aparat>

⁷⁰ Bdk. <https://akurat.co/news/id-744959-read-polda-riau-siap-kirim-300-personel-brimob-ke-papua>

⁷¹ Bdk. <https://regional.kompas.com/read/2019/09/01/13253631/500-personel-brimob-polda-sumut-dikirim-ke-papua>

- Tanggal 1 September 2019, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan bahwa sebanyak 6000 aparat keamanan gabungan dari Polri dan TNI dikirim ke Tanah Papua untuk menjaga keamanan di Tanah Papua.⁷²
- Tanggal 09 September 2019, Menkopolkam Wiranto mengklaim ada 6.500 personel gabungan TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat. Jumlah personel ini merupakan bagian kecil dari 850 ribu keseluruhan pasukan di Indonesia. Pengerahan personel dilakukan diklaim sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dan objek vital daerah agar tidak menjadi sasaran amuk massa.⁷³
- Tanggal 17 Desember 2019, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol A.M. Kamal mengatakan, isu pengerahan pasukan TNI di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, adalah tidak benar.⁷⁴

⁷² <https://www.suara.com/news/2019/09/01/095904/6000-tentara-dan-polisi-terjun-ke-papua-kapolri-kalau-kurang-tambah-lagi>

⁷³ Bdk, <https://nasional.okezone.com/read/2019/09/09/337/2102612/wiranto-sebut-6-500-tni-polri-dikirim-ke-papua-bukan-untuk-menakuti-rakyat>. Diupload Kamis, 06 Januari 2020, pukul 16:12.

⁷⁴ Bdk, <https://www.antaraneews.com/berita/1213340/polda-tidak-ada-pengerahan-pasukan-di-intan-jaya-papua> diunduh Kamis, 06 Januari 2020. Pukul 16:26.

Lampiran 5
Tabel Tersangka / Terdakwa Makar
(Pasal 106 KUHP : Delik kejahatan terhadap Keamanan Negara)
 (AIDP-dihimpun dari berbagai sumber)

Tanggal Penangkapan	Lokasi	Jumlah
8 Januari 2019	Timika	3 orang
28 – 29 Agustus 2019	Jakarta	6 orang
2 September 2019	Manokwari	1 orang
5 - 24 September 2019	Jayapura	8 orang
18 September 2019	Sorong	4 orang
19 September 2019	Manokwari	3 orang
30 November 2019	Jayapura	20 orang
1 Desember 2019	Fak – Fak	23 orang
	Manokwari	7 orang
	Sorong	11 orang

- **Total semua tersangka Pasal Makar sepanjang tahun 2019 : 86 orang**
- **Sebagian ditanggihkan sedangkan yang lainnya sedang menjalani proses persidangan**